POLA KOMUNIKASI POLITIK PEMIMPIN PEREMPUAN ASEAN DALAM MENYERAP DAN MENYALURKAN ASPIRASI PUBLIK
(Studi Deskriptif Empat Negara yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Thailand)

Tesis

DARRA ANANDA
NPM 2226031017

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024

POLA KOMUNIKASI POLITIK PEMIMPIN PEREMPUAN ASEAN DALAM MENYERAP DAN MENYALURKAN ASPIRASI PUBLIK
(Studi Deskriptif Empat Negara yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Thailand)

Oleh

DARRA ANANDA

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU KOMUNIKASI

Pada

Program Studi Magister Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024

ABSTRAK

POLA KOMUNIKASI POLITIK PEMIMPIN PEREMPUAN ASEAN DALAM MENYERAP DAN MENYALURKAN ASPIRASI PUBLIK (Studi Deskriptif Empat Negara yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Thailand)

Oleh
Darra Ananda

Studi ini menelaah komunikasi politik pemimpin perempuan ASEAN dengan memanfaatkan teori retorika persuasif (Aristotle, 1954) dan model *Nonviolence Communication* (Rosenberg, 2015) dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi rakyat dalam kebijakan publik. Menurut (UN Women, 1990) kuota partisipasi perempuan ditetapkan minimal 30 persen, namun di negara-negara ASEAN masih dibawah 30 persen. Pada penelitian terdahulu mengatakan bahwa masalah komunikasi politik yang lazim terjadi adalah ketidakberdayaan perempuan dalam pengambilan kebijakan di ruang parlemen. Hal tersebut didasari atas dominan nya peran laki-laki dalam pembentukan kebijakan dan memengaruhi dinamika komunikasi politik di dalam lembaga legislatif.

Berdasarkan permasalahan ini, maka dilakukan penelitian mengenai pola komunikasi pemimpin perempuan dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi publik, dan hambatan yang ditemui pemimpin perempuan dalam komunikasi politik. Metode yang digunakan merupakan kajian fenomenologi dengan teknik pengumpulan data melalui analisis dokumen dan wawancara intensif dengan informan kunci pemimpin perempuan ASEAN Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Thailand.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi politik pemimpin perempuan ASEAN dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi publik mencerminkan 6 temuan peneliti; keselarasan, interpretasi, pemenuhan hak asasi, sinergi, konsensus, dan inklusifitas. Indonesia dan Filipina memiliki kecenderungan pola komunikasi politik yang mencerminkan 6 temuan peneliti. Sedangkan Malaysia dan Thailand terdapat perbedaan dikarenakan regulasi politik yang ada dan hambatan budaya yang mendasari sistem politik mereka. Perbedaan pola komunikasi politik keempat negara tersebut juga diidentifikasi melalui hambatan komunikasi yang signifikan dalam proses penyerapan dan penyaluran aspirasi. Hambatan tersebut meliputi stereotipe gender dan sosio-ekonomi dalam penyerapan aspirasi, serta stereotipe gender dan regulasi politik dalam penyaluran aspirasi.

Kata Kunci: Pemimpin Perempuan ASEAN, *Nonviolence Communication*, Retorika Persuasif, Konsensus, Inklusif.

ABSTRACT

THE POLITICAL COMMUNICATION PATTERNS OF ASEAN WOMEN LEADERS IN ABSORBING AND CHANNELING PUBLIC ASPIRATIONS (Descriptive Study of Four Countries, namely Indonesia, Philippines, Malaysia and Thailand)

By
Darra Ananda

This study examines the political communication of female leaders in ASEAN by utilizing the theory of persuasive rhetoric (Aristotle, 1954) and the Nonviolence Communication model (Rosenberg, 2015) in absorbing and conveying the aspirations of the people in public policy. According to UN Women (1990), the quota for women's participation is set at a minimum of 30 percent, but in ASEAN countries, it remains below 30 percent. Previous research has indicated that a common issue in political communication is the disempowerment of women in policy-making in parliamentary settings. This is rooted in the dominant role of men in policy formation and influences the dynamics of political communication within legislative bodies. Based on this issue, research was conducted on the communication patterns of female leaders in absorbing and conveying public aspirations, as well as the barriers faced by female leaders in political communication. The method used was a phenomenological study with data collection techniques through document analysis and intensive interviews with key informants of female leaders from ASEAN countries Indonesia, the Philippines, Malaysia, and Thailand. The research findings indicate that the political communication patterns of female leaders in ASEAN in absorbing and conveying public aspirations reflect six researcher findings: alignment, interpretation, fulfillment of human rights, synergy, consensus, and inclusivity. Indonesia and the Philippines tend to exhibit political communication patterns that reflect these six findings. Meanwhile, Malaysia and Thailand show differences due to existing political regulations and cultural barriers underlying their political systems. The differences in political communication patterns in these four countries are also identified through significant communication barriers in the process of absorption and conveyance of aspirations. These barriers include gender and socio-economic stereotypes in aspiration absorption, as well as gender stereotypes and political regulations in aspiration conveyance.

Keywords: Female Leaders in ASEAN, Nonviolence Communication, Persuasive Rhetoric, Consensus, Inclusive.

Judul Tesis	:	POLA KOMUNIKASI POLITIK PEMIMPIN PEREMPUAN ASEAN DALAM MENYERAP DAN MENYALURKAN ASPIRASI PUBLIK (Studi Deskriptif Empat Negara yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Thailand)
Nama Mahasiswa	:	Darra Ananda
Nomor Pokok Mahasiswa	:	2226031017
Program Studi	:	Magister Ilmu Komunikasi
Fakultas	:	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Nanang Trenggono, M.Si.	**Prof. Dr. Andy Corry Wardhani, M.Si.**
NIP. 19621204 198902 1 002	NIP. 19620716 198803 1 001

MENGETAHUI

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi

Dr. Tina Kartika, M.Si.
NIP. 19730323 200604 2 001

MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**

   Ketua : **Dr. Nanang Trenggono, M.Si.**

   Sekretaris : **Prof. Dr. Andy Corry Wardhani, M.Si.**

   Penguji Utama : **Dr. Abdul Firman Ashaf, M.Si.**

2. **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

   Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
   NIP. 196108071987032001

3. **Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung**

   Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
   NIP. 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: **5 April 2024**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Darra Ananda
NPM	: 2226031017
Program Studi	: Magister Ilmu Komunikasi
Jurusan	: Ilmu Komunikasi
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul "Pola Komunikasi Politik Pemimpin Perempuan ASEAN Dalam Menyerap dan Menyalurkan Aspirasi Publik (Studi Deskriptif Empat Negara Yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Thailand)" tersebut adalah asli hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk dari sumbernya dan telah saya sebutkan dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup dituntut berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 1 April 2024
Yang membuat pernyataan

Darra Ananda
NPM 2226031017

RIWAYAT HIDUP

Penulis yang bernama lengkap Darra Ananda dilahirkan di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan pada 14 Februari 1999. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dengan pasangan Bapak Verrizon Daud dan Ibu Erni Lestari.

Penulis menyelesaikan Pendidikan pertamanya di Taman Kanak-Kanak Aisyah Muara Aman, Bengkulu pada tahun 2005. Kemudian, penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Negeri Baru, Way Kanan pada tahun 2011, menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Blambangan Umpu, Way Kanan pada tahun 2014, menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Blambangan Umpu, Way Kanan pada tahun 2017, dan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Lampung pada tahun 2017, pada Program Studi Hubungan Internasional. Pada tahun 2021, penulis berhasil menyelesaikan studinya dan meraih gelar Sarjana Sosial (S.Sos). Kemudian, peneliti kembali melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata 2 (S2) di Universitas Lampung dengan menempuh Program Studi Magister Ilmu Komunikasi.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ يُسْرًا ۝ الْعُسْرِ

“Maka, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

– (QS.94:5)

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا وُسْعَهَا إِلَّا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.“

– (QS.2:286)

"The only way to achieve the impossible is to believe it is possible."

- Charles Kingsleigh

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT

Penulis persembahkan Karya ini untuk:

Keluarga

Untuk Mama dan Papa, adikku Abel, Risqi, dan Sandra sebagai bentuk terima kasihku dalam mendukung dan mendoakan selama ini khususnya dalam perkuliahan.

Diri Sendiri

Dan untuk diriku sendiri yang telah berhasil menyelesaikan tanggung jawab atas apa yang sudah dipilih.

Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Komunikasi

Untuk Bapak dan Ibu Dosen yang sudah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama menempuh Pendidikan Pascasarjana Ilmu Komunikasi.

Serta

Almamater Jurusan Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi
Universitas Lampung

SANWACANA

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya tesis ini dapat diselesaikan.

Tesis yang berjudul "Pola Komunikasi Politik Pemimpin Perempuan ASEAN Dalam Menyerap dan Menyalurkan Aspirasi Publik (Studi Deskriptif Empat Negara Yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Thailand)" ini dengan baik. Dengan berbekal keyakinan dan kerja keras, bimbingan dan ridho dari Allah SWT, serta bantuan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Melalui kesempatan ini, penulis hendak mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberi dukungan moril maupun spiritual.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran, kemudahan, dan ridho-Nya untuk penulis dalam menyelesaikan studi dan Penelitian ini;
2. Teruntuk Kedua orang tua Penulis, Bapak Verrizon Daud dan Ibu Erni Lestari yang tiada henti-henti nya mendoakan dan memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih telah membersamai penulis sampai detik ini, beberapa tahun belakang bukan waktu yang mudah bagi kita sekeluarga, tapi terima kasih sudah mau bertahan dan sama-sama berjuang. Terima kasih atas segala pengorbanan, perjuangan dan kasih sayang yang sangat luar biasa kepada penulis;
3. Teruntuk adik-adikku, Putri Abellia, M. Risqi Akbar, dan Sandra Az-Zahra, terima kasih telah selalu mendukung penulis, maaf jika selama menempuh pendidikan melewati waktu-waktu berharga bersama kalian, maaf jika sebagai seorang kakak belum bisa bertanggung jawab selayaknya, terima

kasih sudah menjadi anak-anak dan adik yang baik, semoga Allah selalu menjaga kalian, sampai bertemu dirumah;

4. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung;
5. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. Selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
6. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
7. Ibu Dr. Tina Kartika, M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
8. Bapak Dr. Nanang Trenggono, M.Si., selaku Pembimbing Pertama. Terima kasih atas waktu, ilmu, dan saran selama proses bimbingan. Dengan adanya masukan dan saran dari bapak, membuat penelitian saya jadi lebih terarah. Terima kasih telah memberikan respon yang baik selama proses bimbingan, semoga kebaikan bapak mendapatkan balasan hal-hal baik pula dari Allah SWT;
9. Bapak Prof. Dr. Andy Corry Wardhani, M.Si., selaku Pembimbing Kedua, yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penelitian ini;
10. Bapak Dr. Abdul Firman Ashaf, M.Si., selaku dosen pembahas, yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat membantu selama proses penelitian;
11. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar pada Magister Ilmu Komunikasi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat;
12. Mbak Vivi selaku Staff di Program Studi Magister Ilmu Komunikasi yang senantiasa dengan keikhlasan hati membantu berbagai proses administrasi selama penulis menempuh pendidikan di Magister Ilmu Komunikasi Universitas Lampung;
13. Ibu Ledia Hanifa Amaliah (DPR RI), Ibu Nihayatul Wafiroh (DPR RI), Ibu Siti Mastura (Parlemen Malaysia), Ibu Pia Cayetano (Parlemen Filipina), Ibu Chitpas Kridakorn (Parlemen Thailand), terima kasih telah memberikan

kesempatan dan waktunya untuk peneliti dalam menyelesaikan penelitian, terima kasih telah bersedia di wawancarai;

14. Sahabat-sahabat tercinta, Wulan Difitri, S.H., Mauli Agustina, S.H., Masrani Afrianti, S.Tr.,Keb., yang selalu menjadi tempat keluh kesah penulis, yang selalu memberikan dukungan dan masukan yang sangat berarti, terima kasih atas persahabatan yang baik ini, semoga kita bisa selalu bersama-sama dalam suka dan cita, semoga Allah mudahkan segala urusan dan di ridhoi dalam mencapai impian kita;
15. Sahabat-sahabat Magister, Annisa Dwi Kurnia, S.I.Kom., mba Efna Fitriana, Devani Oktavianti, S.I.Kom, Dani Setiawan, S.I.Kom, Gary Andrekho, S.I.Kom, Ernaldi Gustrin, S.I.Kom, dan Ria Wandita, S.I.Kom, terima kasih sudah membuat dunia S2 penulis menjadi berkesan, terima kasih sudah selalu membantu penulis dalam perkuliahan dan penelitian, semoga kita semua tetap bisa menjadi sahabat sampai kapanpun, dan Allah selalu menjaga kita;
16. Teman-teman kelas Komunikasi Politik (Kompol), Mba Desi, Mas Chandra, Cik Helen, dan Diah, terima kasih telah bersama-sama penulis melalui perkuliahan di kelas Kompol yang sangat berkesan;
17. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung angkatan 2022 yang senantiasa saling mendukung dan memberi semangat dari awal kuliah hingga akhir.

Bandar Lampung, 30 Maret 2024

Darra Ananda
2226031017

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR BAGAN ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iv**
DAFTAR TABEL ..... **vi**
DAFTAR SINGKATAN ..... **vii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 8
1.3. Tujuan Penelitian 8
1.4. Manfaat Penelitian 9
1.5. Kerangka Pemikiran 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **16**
2.1. Penelitian Terdahulu 16
2.2. Landasan Teori 26
2.2.1. Teori Retorika Persuasi 27
2.2.2. Pendekatan *Nonviolent Communication* (NVC) 29
2.3. Landasan Konseptual 33
2.3.1. Komunikasi Politik 33
2.3.2. Pola Komunikasi 34
2.3.3. Pola Komunikasi Sirkuler 36
2.3.4. Komponen Komunikasi 38
2.3.4.1. Kredibilitas Komunikator 39
2.3.4.2. Opini Publik 39
2.3.4.3. Pesan Komunikasi 39
2.3.4.4. Saluran Komunikasi 40
2.3.4.5. Efek 40
2.3.5. Gender dan Politik 40

BAB III METODE PENELITIAN 42
3.1. Pendekatan Penelitian 42
3.2. Metode Penelitian 43
3.3. Subjek dan Objek Penelitian 44
3.4. Teknik Pengumpulan Data 45
3.5. Keabsahan Data 46
3.6. Teknik Analisis Data 46

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 49
4.1. Hasil Penelitian 49
4.1.1. Gambaran Umum ASEAN 49
4.1.2. Pendekatan dan Strategi Penemuan Informan 52
4.1.2.1 Profil Informan 56
4.1.3. Pola Komunikasi Politik 64
4.1.3.1. Menyerap Aspirasi Publik 66
4.1.3.2. Menyalurkan Aspirasi Publik 139
4.1.4. Hambatan Komunikasi 173
4.1.4.1. Hambatan Komunikasi dalam Menyerap Aspirasi 174
4.1.4.2. Hambatan Komunikasi dalam Menyalurkan Aspirasi 178
4.2. Analisis dan Pembahasan 192
4.2.1. Pola Komunikasi dalam Menyerap dan Menyalurkan Aspirasi 193
4.2.1. Temuan-Temuan Penelitian 216

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 235
5.1. Kesimpulan 235
5.2. Saran 238

DAFTAR PUSTAKA 240
Daftar Indeks 251
Lampiran Wawancara 254

DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran..... 13
Bagan 2.2 Empat Komponen *Nonviolence Communication*..... 30
Bagan 3.4 Pola Komunikasi Politik Pemimpin Perempuan ASEAN dalam Menyerap dan Menyalurkan Aspirasi Publik..... 217

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Persentase kursi perempuan di parlemen nasional 5
Gambar 2.2 Model Komunikasi oleh Osgood dan Schramm 37
Gambar 3.3 Komponen Analisis Data: Model Interaktif 47
Gambar 4.4 Chitpas mengunjungi atlet di Pusat Pelatihan Olahraga Nasional ... 70
Gambar 5.4 Chitpas Come to School on the Border 71
Gambar 6.4 The House of Representatives. 73
Gambar 7.4 Study the implementation of the duties of the Natural Resources and Environmental Crime Eradication Division police officers 74
Gambar 8.4 Ledia Hanifa Membahas Terkait PPPK Guru 76
Gambar 9.4 Website Nihayah Center 80
Gambar 10.4 Rodziah Menerima Masyarakat untuk Mendengar Aspirasi 85
Gambar 11.4 Rodziah Mendatangi Masyarakat 86
Gambar 12.4 Chitpas at TCD Baan Nong Khaem District's School 90
Gambar 13.4 #RightBase Penyandang Disabilitas 92
Gambar 14.4 Program OSCC oleh Rodziah Ismail 97
Gambar 15.4 Chitpas Saat Mengunjungi Area bermasalah Provinsi Chiang Rai 100
Gambar 16.4 "Chitpat" menciptakan model solusi Thailand 4.0 101
Gambar 17.4 Undangan Atlet Penyandang Disabilitas Nasional Thailand 104
Gambar 18.4 Mengunjungi Ke Rumah Penerima Beasiswa KIP Kuliah 109
Gambar 19.4 Keterangan Nihayatul Dalam Unggahan Instagram 112
Gambar 20.4 Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan RI 113
Gambar 21.4 Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh saat Raket .. 114
Gambar 22.4 Republic Act No. 10747 "Rare Diseases Act of the Philippines" . 117
Gambar 23.4 Program Bantuan untuk Wanita yang ditinggal Suami Meninggal 121

Gambar 24.4 Rodziah Menerima Masyarakat untuk Mendengar Aspirasi 136
Gambar 25.4 Rodziah Mendatangi Masyarakat 137
Gambar 26.4 Program OSCC oleh Rodziah Ismail 136
Gambar 27.4 Program Bantuan untuk Wanita yang ditinggal Suami Meninggal 137
Gambar 28.4 Aristotle’s Rhetorical Triangle 140
Gambar 29.4. "Tan Jitphat" dressed in full uniform at a council meeting 144
Gambar 30.4 "Tan Jitpat" Mendukung RUU Pinjaman Dana Pendidikan 145
Gambar 31.4 Chitpas's Caption on Her Instagram as a Parliament 146
Gambar 32.4 Ledia Hanifa dalam Rapat Parlemen 148
Gambar 33.4.Catatan Fraksi PKS RKA-K/L Kemdikbudristek tahun 2024 151
Gambar 34.4 Korban Kekerasan Seksual harus dicover BPJS Kesehatan 154
Gambar 35.4 Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan RI 155
Gambar 36.4 The House of Representatives approves on second reading a proposal to extend maternity leave. 159
Gambar 37.4 Expanded Maternity Leave Law 160
Gambar 38.4 Menganjurkan Kesadaran dan Langkah Pencegahan Kanker 162
Gambar 39.4 Program Jaminan Sosial Ibu Rumah Tangga (SKSSR) 165
Gambar 40.4 Preference for male political leaders over time (2005 – 2022) 175
Gambar 41.4 Pola Komunikasi Sirkuler 216

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 23
Tabel 2.2 Definisi Konsep Ethos, Pathos dan Logos 27
Tabel 3.4 Kuota Pemilu untuk Perempuan di Asia Tenggara 53
Tabel 4.4 Kriteria Informan Kunci..... 54
Tabel 5.4 *NVC* Pemimpin Perempuan dalam Menyerap Apirasi Publik 123
Tabel 6.4 Retorika Persuasif dalam Menyalurkasn Aspirasi Publik..... 167
Tabel 7.4 Persentase Kepemimpinan Perempuan Asia Tenggara di Parlemen .. 190
Tabel 8.4 Hasil Konstruksi Peneliti terhadap NVC Parlemen Filipina..... 196
Tabel 9.4 Hasil Konstruksi Peneliti terhadap NVC Parlemen Indonesia..... 201
Tabel 10.4 Hasil Konstruksi Peneliti terhadap NVC Parlemen Thailand..... 204
Tabel 11.4 Hasil Konstruksi Peneliti terhadap NVC Parlemen Malaysia 207
Tabel 12.4 Researcher's Findings Regarding Barriers to Women in Politics 232

DAFTAR SINGKATAN

APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APSA	*American Political Science Association*
APSC	*ASEAN Political Security Community*
ASEAN	*Association of South East Asian Nations*
BBC	*British Broadcasting Corporation*
BKKBN	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPOM	Badan Pengawas Obat dan Makanan
CEDAW	*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*
CGEO	*Chief Gender Equality Officer*
CPWSD	*Committee for Promotion of Women Status Development*
DAU	Dana Alokasi Umum
EIU	*Economist Intelligence Unit*
GAD	*Gender And Development*
GFP	*Gender Focal Point*
HOR	*The House of Representative*
ICA	*International Communication Association*
IDEA	*International Institute for Democracy and Electoral Assistance*
IPU	*Inter-Parliamentary Union*
JKM	Jabatan Kebajikan Masyarakat
LZS	Lembaga Zakat Selangor (Malaysia)
NCA	*National Communication Association*

NVC	*Nonviolent Communication*
MP	*Member of Parliament*
OECD	*Organisation for Economic Co-operation and Development*
OSCC	*One Stop Crisis Center*
PDRC	*People's Democratic Reform Committe*
PPPK	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PWB	Pemberdayaan Perempuan Berkelanjutan
RA	*Republict Act*
RM	Ringgit Malaysia
RUU	Rancangan Undang-Undang
SDGs	*Sustainable Development Goals*
SRD	*Simple Research Design*
UDHR	*Universal Declaration of Human Rights*
UN	*United Nations*
UNDP	*United Nations Development Programme*
VAWP	*Violence Against Women in Politics*
WEF	*World Economic Forum*
WEI	*Women's Empowerment Index*
WFD	*Westminster Foundation for Democracy*
WHO	*World Health Organization*
WPS	*Women, Peace and Security*

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Komunikasi merupakan mekanisme yang menyebabkan adanya suatu hubungan antarmanusia dan mengembangkan semua lambang pikiran secara bersama dengan sarana tertentu (Cooley, 1990). Komunikasi yang dipahami sebagai mekanisme tersebut memiliki relevansi yang kuat dalam konteks pola komunikasi politik. Dalam politik, komunikasi menjadi landasan utama dalam membangun hubungan antara pemimpin dan masyarakat, serta antar pemimpin dengan pemimpin lainnya. Pola komunikasi politik yang efektif memungkinkan penyampaian pesan-pesan politik dengan jelas, membangun kepercayaan dan kedekatan dengan masyarakat, serta merangsang pemikiran bersama untuk mencapai tujuan politik yang diinginkan. Dengan demikian, pemahaman akan pentingnya komunikasi dalam membentuk hubungan dan mengembangkan pemikiran bersama menjadi kunci dalam merancang dan menjalankan pola komunikasi politik yang berhasil dan berdampak positif dalam konteks politik.

Pada komunikasi terdapat pola yang merujuk terhadap cara aktor berinteraksi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses menggunakan strategi dan metode tertentu (Onong Uchjiyana Efendy, 2006). Perubahan dinamika global menyebabkan dunia menjadi lebih kompleks, sehingga pola komunikasi pemimpin perempuan ASEAN dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi publik juga harus beradaptasi dengan berbagai tantangan dan peluang yang muncul. Dalam menghadapi kompleksitas dunia yang terus berubah, penting bagi pemimpin perempuan untuk memperkuat pola komunikasi politik mereka agar dapat efektif dalam merespons perubahan-perubahan tersebut. Hal ini

mencakup kemampuan untuk berkomunikasi secara inklusif, adaptif, dan proaktif dalam menyampaikan pesan-pesan yang relevan dan membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan pola komunikasi yang kuat dan terarah, pemimpin perempuan ASEAN dapat memainkan peran yang lebih strategis dalam mewujudkan aspirasi publik dan menjawab tantangan-tantangan global yang semakin kompleks.

Pada penelitian (Choi, 2018) mengatakan bahwa masalah komunikasi politik yang lazim terjadi adalah ketidakberdayaan perempuan dalam pengambilan kebijakan di ruang parlemen. Hal tersebut didasari atas dominan nya peran laki-laki dalam pembentukan kebijakan. Peran dominan laki-laki dalam ruang parlemen dapat menciptakan kesenjangan dalam representasi dan partisipasi politik perempuan. Keterwakilan yang tidak seimbang ini dapat menghambat perempuan dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka, serta memengaruhi dinamika komunikasi politik di dalam lembaga legislatif. (Choi, 2018) juga mengatakan bahwa khususnya di Asia Tenggara, terdapat tiga jalur perempuan dalam partisipasi politik yaitu; *Elite Path*, *Middle Path*, dan *Grassroots Path*. Kecenderungan politisi perempuan Asia Tenggara di ranah politik adalah jalur elit politik yang dilatar belakangi oleh budaya dinasti. Hal tersebut justru menimbulkan masalah dikarenakan, politisi perempuan dari jalur elit dengan status sosial ekonomi tinggi, dipandang tidak memiliki pengalaman yang mumpuni dalam politik. Sehingga, kurang dapat menyuarakan kepentingan di ruang parlemen (Choi, 2018).

Partisipasi perempuan dalam politik merupakan isu yang penting dan mendapatkan perhatian yang semakin besar di tingkat global. Di kawasan Asia Tenggara, partisipasi politik perempuan terus mengalami kemajuan, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. *The Association of South East Asian Nations* (ASEAN) mengadopsi Deklarasi Kemajuan Perempuan di kawasan pada tahun 1988, yang mempromosikan partisipasi perempuan yang adil dan efektif di segala bidang dan di berbagai tingkat kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Komite Rencana Kerja Perempuan ASEAN untuk tahun 2016–2020 memiliki fokus pada peningkatan jumlah perempuan dalam posisi kepemimpinan di seluruh negara anggota ASEAN, khususnya pada posisi yang ditunjuk dan

dipilih (ASEAN A. o., 2016). Selaras terhadap mempromosikan partisipasi perempuan, *United Nations Development Programme* (UNDP) selaku badan utama PBB untuk pembangunan internasional, juga telah mendukung perempuan dalam politik di seluruh dunia (International IDEA, 2017).

Partisipasi perempuan di ranah politik adalah sebuah aspek penting dalam memastikan representasi yang inklusif dan beragam dalam pengambilan keputusan publik. Komunikasi politik memainkan peran vital dalam memfasilitasi partisipasi perempuan dan memperkuat suara mereka dalam ruang politik. Komunikasi politik yang efektif dapat memberikan platform untuk perempuan menyuarakan pandangan, aspirasi, dan kebutuhan mereka. Melalui komunikasi politik yang inklusif, perempuan dapat memperoleh dukungan, membangun kredibilitas, dan mengartikulasikan agenda-agenda yang relevan bagi masyarakat. Menurut penelitian (Nwankwor, 2022), melalui komunikasi politik yang kuat dan strategis, politisi perempuan dapat menjadi contoh teladan yang memotivasi perempuan lain untuk mengambil peran aktif dalam pembentukan masa depan politik yang lebih inklusif dan berkeadilan gender.

Partisipasi perempuan di kawasan ASEAN telah meningkat selama beberapa dekade terakhir, dengan semakin banyak perempuan yang memegang posisi politik dan terlibat dalam berbagai sektor masyarakat. Beberapa bidang utama yang mengalami kemajuan meliputi pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan, khususnya di bidang representasi politik dan kepemimpinan (ASEAN Secretariat, 2021). Menurut (Wardoyo, Trenggono, & et al, 2003) dalam buku Meniti Partisipasi Publik, mengatakan bahwa partisipasi politik merupakan wacana yang dianggap penting. Partisipasi ini diletakkan dalam peran dan aktivitas yang dapat mempengaruhi keputusan-keptusan politik. Ketidakseimbangan representasi politik formal dari sudut pandang gender telah menyebabkan perempuan di seluruh dunia sebagian besar terpinggirkan dan menjadi minoritas global meskipun populasi mereka sama dengan laki-laki (Philips, 1998). Secara keseluruhan, tingkat keterwakilan politik perempuan masih rendah dan tidak mencapai kuota 30 persen seperti yang

disepakati oleh berbagai aktor, khususnya pemerintah negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Di kawasan ASEAN, negara-negara anggota telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan melalui kebijakan dan program yang bertujuan untuk memastikan kesetaraan gender dalam arena politik (Nwankwor, 2022). Namun, meskipun adanya kemajuan, masih terdapat kesenjangan gender yang signifikan dalam partisipasi politik di kawasan ini. Untuk menelusuri kemajuan politik perempuan di negara-negara ASEAN, penulis melihat pengalaman di empat negara, Indonesia (274 juta jiwa), Filipina (110 juta jiwa), Thailand (70 juta jiwa), Malaysia (33 Juta jiwa) (World Bank, 2023). Beragamnya atribut sosial, relasional dan kelembagaan yang menjadi ciri negara-negara Asia Tenggara menghadirkan berbagai tantangan bagi perempuan dan para analis kemajuan politik perempuan.

Menurut jurnal *Women's Political Pathways in Southeast Asia*, disebutkan bahwa Indonesia adalah masyarakat yang luas, beragam, dan mayoritas penduduknya beragama Islam, yang di satu sisi telah mengalami transformasi politik dan sosial, dan pergeseran ke arah Islam konservatif di sisi lain. Sebaliknya, Filipina adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Katolik, dan "orang-orang besar" lokal secara historis mendominasi politik dan institusi pemerintahan (Choi, 2018, hal. 7). Di Thailand yang mayoritas penduduknya beragama Budha, sejarah gerakan demokrasi yang penuh gejolak, kudeta militer dan pemberontakan rakyat yang terjadi selama tiga dekade terakhir telah memberikan tantangan tersendiri bagi perempuan. Meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi politik dan sosial budaya, dengan menurunkan unit analisis ke tingkat provinsi dan kabupaten, penulis melihat adanya pola serupa dan perbedaan nyata dalam keterwakilan perempuan dalam politik lintas negara.

Kuota gender dalam pemilu merupakan alat utama yang digunakan secara global untuk mempercepat keterwakilan perempuan di parlemen. Menurut report dari University of Sydney dan Universitas Gadjah Mada, Kemajuan signifikan telah dicapai dalam hal kesetaraan gender di Asia Tenggara (Sinpeng, 2022, hal. 9) Dengan jumlah penduduk sebesar 330 juta jiwa, jumlah perempuan di Asia

Tenggara yang berpendidikan saat ini jauh lebih banyak dibandingkan sebelumnya, jumlah mereka yang menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah hampir sama dengan jumlah laki-laki, dan angka partisipasi mereka di pendidikan tinggi meningkat (Sinpeng, 2022).

Partisipasi politik dan kepemimpinan merupakan area di mana kesenjangan gender telah menyempit dan melebar di kawasan ASEAN dalam 20 tahun terakhir (gambar 1.1). Indonesia hanya mempunyai 8% kursi di parlemen nasional yang ditempati oleh perempuan pada tahun 2000. Pada tahun 2022, angka tersebut meningkat menjadi 21%. Sebaliknya, jumlah perempuan yang menduduki kursi parlemen nasional di Thailand pada tahun 2000 adalah 6%. Naik menjadi 16% pada tahun 2012 lalu turun kembali menjadi 5% pada tahun 2019 dan baru-baru ini kembali naik menjadi 16% pada tahun 2022 (ASEAN A. o., 2016).

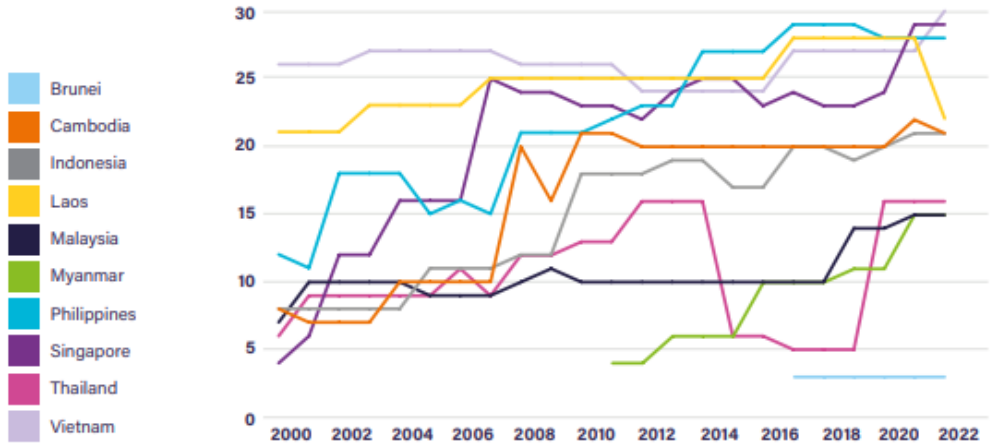

Gambar 1.1 Persentase kursi yang dipegang oleh perempuan di parlemen nasional
Sumber: Inter-Parliamentary Union

Parlemen nasional memainkan peran penting dalam menetapkan arah kebijakan dan alokasi anggaran untuk pembangunan berkelanjutan. Meningkatnya keterwakilan perempuan di parlemen, khususnya keterwakilan dan suara substantif, dapat memelopori perubahan kebijakan di bidang-bidang yang sangat penting untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, seperti kebijakan pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan layak dan perawatan (UN Women, 2022). Namun permasalahannya untuk rata-rata regional, nilai

partisipasi kepemimpinan perempuan masih berada di bawah angka global yaitu 30 persen (gambar 1). Hal ini dibuktikan pada empat negara yang akan di deskripsikan pada penelitian ini, yaitu Indonesia (21%), Filipina (28%), Malaysia (13%), dan Thailand (16%) (Sinpeng, 2022, hal. 10).

Dengan hanya menguasai 13 hingga 20-an% kursi parlemen di keempat negara tersebut, perempuan terus menghadapi kendala dalam aspirasi mereka untuk menjadi pemimpin politik (ASEAN A. o., 2016). Terbukti menurut jurnal *Women Empowerment and Economic Development* (Duflo, 2012, hal. 1053), bahwasannya kehadiran perwakilan perempuan yang terpilih dapat memberikan dampak positif terhadap keterlibatan perempuan dan anak perempuan dalam masyarakat secara luas (Duflo, 2012). Dimana partisipasi dan keterwakilan perempuan yang lebih tinggi diasumsikan akan bermanfaat bagi kualitas demokrasi.

Pada beberapa penelitian terdahulu, peneliti melihat adanya kesenjangan dimana ketidaksesuaian antara fakta yang terjadi dilapangan dengan apa yang seharusnya terjadi. Dalam jurnal yang ditulis Choi juga, dipertegas bahwasannya para analis mengemukakan hipotesis jika desentralisasi dikombinasikan dengan reformasi demokrasi maka akan mendorong atau berpotensi mendorong kemajuan politik perempuan (Choi, 2018, hal. 4). Secara luas diasumsikan bahwa reformasi demokrasi, pembangunan ekonomi dan desentralisasi politik kondusif bagi kemajuan politik perempuan dan terpilihnya lembaga-lembaga politik yang representatif. Demikian pula, perluasan akses perempuan terhadap pendidikan dan pekerjaan telah dianggap sebagai “pendorong utama pembangunan demokrasi” (Choi, 2018).

Selain potensi manfaat penting dari memiliki pemimpin politik perempuan, mendorong kesetaraan partisipasi kepemimpinan politik perempuan juga berarti memastikan dunia yang lebih adil, setara, demokratis, dan berpusat pada hak asasi manusia (Nwankwor, 2022). Paparan kepemimpinan perempuan yang berkepanjangan dan terus-menerus dapat mengubah norma dan peraturan informal. Aturan-aturan ini telah lama mendasari norma-norma dan nilai-nilai gender tradisional yang menghasilkan ketidaksetaraan gender. Meskipun terdapat

norma-norma dan aturan yang mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam politik, tapi faktanya sering kali dipinggirkan dibandingkan diberdayakan (Siahaan, 2002, hal. 28). Oleh karena itu riset ini juga akan menelaah bagaimana bentuk-bentuk tantangan atau hambatan yang dihadapi perempuan dalam partisipasi kepemimpinan politik.

Menurut Laporan dari *Asia-Pacific Human Development*, menyebutkan bahwa Politisi perempuan sering dipuji karena kualitas politik mereka yang "feminin" – misalnya, mereka inklusif, konsultatif, kolaboratif, lebih toleran, berorientasi pada masyarakat dan fokus pada penyelesaian masalah (UNDP A. P., 2010). Demokrasi membuka ruang untuk kebebasan berekspresi dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan memaparkan bagaimana praktek kepemimpinan perempuan di empat negara dalam mengaktualisasikan kebijakan yang berorientasi pada masyarakat dan fokus pada penyelesaian masalah.

Belum banyak penelitian yang dilakukan terkait topik komunikasi politik pemimpin perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus menggambarkan pola komunikasi politik perempuan ASEAN dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi publik. Penggambaran tentang komunikasi politik pemimpin perempuan ASEAN hasil riset ini bermanfaat menambah literasi pengetahuan mengenai studi gender dalam lingkup regional ASEAN. Juga menambah pengetahuan di bidang ilmu komunikasi. Apalagi dalam penelitian ini akan diterapkan pendekatan *nonviolent communication* yang masih jarang digunakan dalam penelitian komunikasi. Laporan penelitian ini juga dapat memberikan informasi tentang tumbuhnya kepemimpinan perempuan yang terbukti dalam berbagai laporan dari institusi dan organisasi kepemimpinan perempuan banyak membantu program pembangunan masyarakat di berbagai sektor seperti, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, atau kesejahteraan perempuan, yang mana partisipasi dan kepemimpinan perempuan yang setara dalam kehidupan politik dan publik sangat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, demokrasi, dan masyarakat yang lebih adil.

1.2. Rumusan Masalah

Pada era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, komunikasi politik telah menjadi faktor penting dalam mempengaruhi opini publik dan partisipasi politik masyarakat. Di ASEAN, peran perempuan dalam kepemimpinan politik semakin meningkat, dan penting untuk memahami pola komunikasi politik yang mereka gunakan dalam menyampaikan aspirasi publik. Partisipasi perempuan yang setara dalam pemerintahan sangat penting bagi demokrasi dan mencapai pembangunan berkelanjutan. Meskipun perjuangan untuk mengatasi marginalisasi perempuan dalam posisi kepemimpinan menunjukkan keberhasilan, kemajuan ini berjalan lambat dan tidak merata. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola komunikasi politik pemimpin perempuan ASEAN dalam menyerap aspirasi publik?
2. Bagaimana pola komunikasi politik pemimpin perempuan ASEAN dalam menyalurkan aspirasi publik?
3. Bagaimana hambatan komunikasi yang dialami pemimpin perempuan ASEAN dalam penyerapan dan penyaluran aspirasi publik?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pola komunikasi politik pemimpin perempuan ASEAN dalam menyerap aspirasi publik.
2. Menganalisis pola komunikasi politik pemimpin perempuan ASEAN dalam menyalurkan aspirasi publik.
3. Memahami hambatan komunikasi yang dialami pemimpin perempuan ASEAN dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi publik.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini akan memberikan pemahaman mengenai pola komunikasi politik yang digunakan oleh pemimpin perempuan di Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Thailand. Hal ini akan membantu mengidentifikasi praktik terbaik dan pola yang efektif dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi publik.
2. Penelitian ini akan memberikan pemahaman terkait tantangan dan hambatan komunikasi pemimpin perempuan dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi publik.

1.5. Kerangka Pemikiran

Dinamika politik global telah mempengaruhi kebijakan-kebijakan termasuk pada quota gender politik. Quota gender politik adalah kebijakan yang diterapkan oleh beberapa negara untuk memastikan representasi perempuan yang lebih besar di pemerintahan atau lembaga politik. Pada beberapa negara-negara ASEAN, ada beberapa contoh quota yang diterapkan, Filipina; Undang-Undang Republik Nomor 9710, atau yang dikenal sebagai Magna Carta of Women, memperkenalkan quota gender dalam pemilihan umum. Undang-undang ini memastikan bahwa setidaknya 30% kandidat yang diusung oleh partai politik harus perempuan. Kebijakan Afirmasi Indonesia; dimana, UU No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilu, kemudian Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyatakan: "Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%".

Thailand, Undang-Undang Partai dari Politik tahun 2017. Undang-undang ini mengharuskan partai politik untuk mencalonkan setidaknya 30% kandidat perempuan dalam daftar calon legislatif mereka. Jika partai politik tidak memenuhi persyaratan ini, mereka dapat dikenakan sanksi berupa denda atau pembatasan akses ke dana publik. Selain itu, Konstitusi Thailand tahun 2017 juga

memiliki ketentuan yang mempromosikan kesetaraan gender dalam politik. Pasal 84 Konstitusi menyatakan bahwa partai politik harus memperhatikan kesetaraan gender dalam penyusunan daftar calon legislatif mereka. Jika partai politik tidak memenuhi persyaratan ini, Komisi Pemilihan Umum Thailand dapat menolak daftar calon mereka. Tujuan dari quota gender politik adalah untuk mengatasi ketimpangan gender dalam politik, memperkuat partisipasi politik perempuan, dan memperjuangkan persamaan gender di tingkat kebijakan.

Malaysia, terdapat Undang-Undang (UU) yang mengatur tentang kuota gender dalam beberapa konteks. Salah satu UU yang relevan adalah Akta Pilihan Raya 1954 (Akta 254), yang telah mengalami beberapa perubahan sejak itu. Akta ini memuat ketentuan tentang kuota gender dalam pemilihan umum di Malaysia. Menurut Akta Pilihan Raya 1954, kuota gender diterapkan dalam hal pencalonan calon perempuan dalam pemilihan umum. Setidaknya 30% dari calon yang diusulkan oleh partai politik haruslah perempuan. Hal ini bertujuan untuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik dan meningkatkan keterwakilan mereka di lembaga legislatif.

Namun, tidak sejalan dengan kebijakan pada regulasi formal, masih terdapat ketimpangan antara quota gender perempuan dalam pemerintahan. Dimana, khususnya pada negara-negara ASEAN, partisipasi politik perempuan masih kurang dari 30%. Hal tersebut menimbulkan kesenjangan antara ***Ideal Statement*** dan ***Actual Statement.*** Padahal, dengan partisipasi perempuan dalam pemerintahan dapat mewujudkan salah satu tujuan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) tentang kesetaraan gender. Dalam mewujudkan kesetaraan gender, peran aktif perempuan dalam berbagai bidang pembangunan juga perlu ditingkatkan, terutama dalam bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan.

Merujuk pada teori Retorika Aristoteles, yang mana merupakan tentang penggunaan bahasa dan gaya berbicara yang persuasif untuk memengaruhi audiens. Dalam konteks politik, penggunaan Teori Retorika sangat penting karena politik sering kali melibatkan upaya untuk mengkomunikasikan ide, mempengaruhi opini publik, dan memenangkan dukungan dari masyarakat. Pada

penelitian ini, teori retorika peneliti gunakan dalam menganalisis bagaimana pola komunikasi pemimpin perempuan ASEAN dalam menyalurkan aspirasi publik.

Beberapa konsep kunci dalam Teori Retorika yang sering digunakan dalam politik meliputi, *ethos, pathos,* dan *logos. Ethos* (Etika), pemimpin perempuan harus membangun ethos yang kuat, yaitu kredibilitas dan kepercayaan. Untuk mencapai ini, pemimpin perempuan harus menunjukkan integritas, keahlian, pengalaman yang relevan, dan komitmen terhadap nilai-nilai yang dihormati. *Pathos* (Emosi), pemimpin perempuan harus mampu menghubungkan dengan emosi. Mereka dapat menggunakan cerita, contoh konkret, atau bahasa yang menggerakkan emosi untuk menarik perhatian dan membangkitkan emosi yang relevan. Menggugah emosi dapat membantu membangun ikatan emosional dan mempengaruhi sikap dan perilaku mereka. *Logos* (Logika), pemimpin perempuan harus menggunakan logika yang kuat dan argumen yang terorganisir dengan baik. Mereka harus menyajikan fakta yang akurat, bukti yang relevan, dan argumen yang berdasarkan pemikiran rasional. Logos yang kuat membantu membangun kepercayaan intelektual dan meyakinkan bahwa pandangan dan tindakan yang dilakukan adalah yang terbaik.

Jika peneliti amati cara komunikasi dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pemimpin wanita di empat negara ASEAN, serta melihatnya dari media sosial pribadi mereka, peneliti dapat melihat bagaimana pemimpin perempuan tersebut mencitrakan personal diri dengan baik. Dalam konteks ini, citra diri yang ditampilkan oleh pemimpin perempuan melalui komunikasi mereka dan kegiatan di media sosial pribadi dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kepemimpinan mereka.

Selain itu, pada penelitian ini juga membedah pola komunikasi politik pemimpin perempuan ASEAN dalam menyesuaikan diri pada peraturan resmi partisipasi politiknya, dan mengenai pola komunikasi politik pemimpin perempuan ASEAN dalam menghadapi dan menyelesaikan tantangan yang mendiskreditkan perempuan. Peneliti menggunakan model *Nonviolent Communication,* yang mana akan membedah pertanyaan penelitian, yaitu, pola komunikasi politik pemimpin perempuan ASEAN dalam menyalurkan aspirasi

dan kepentingan publik, yang dianalisis menggunakan model NVC menggunakan empat komponen. Sehingga, penelitian ini akan dapat memberikan hasil bagaimana pola komunikasi politik yang dilakukan oleh pemimpin perempuan dalam dalam menyalurkan aspirasi dan kepentingan publik, yang dilihat dari *Empathy, Collaboration, Authenticity, dan Freedom.*

Kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan dalam bagan berikut:

Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran

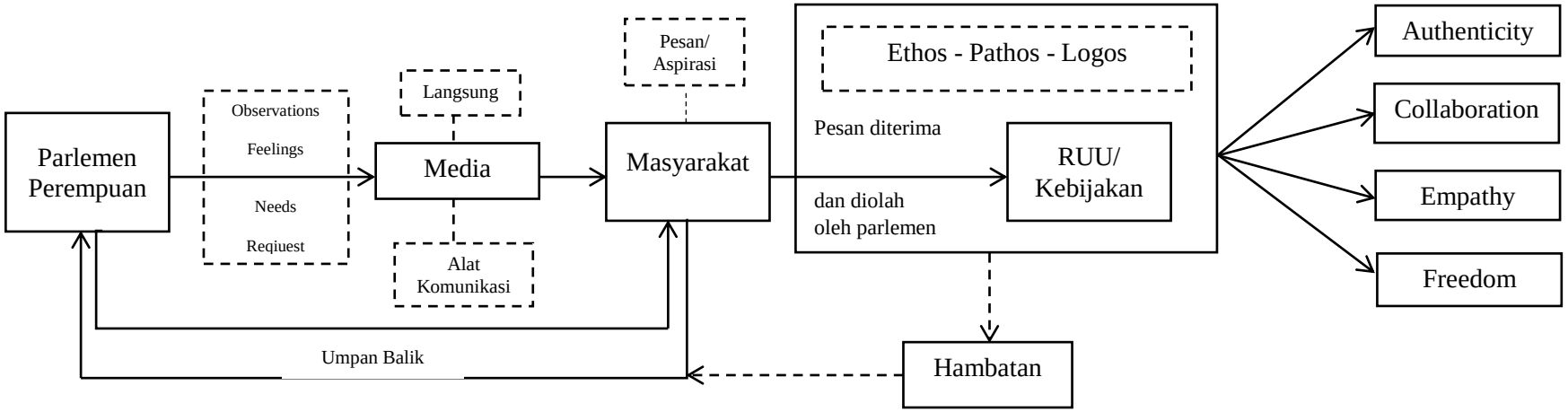

Bagan diatas, merupakan parlemen perempuan ASEAN dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi publik. Pertama, parlemen perempuan menyerap aspirasi meminjam model dari (Rosenberg, 2015), *Nonviolence Communication* yang memiliki empat komponen, yaitu *Observations, Feelings, Needs*, dan *Requests*.

1. *Observations* (pengamatan), adalah bagaimana pemimpin perempuan melihat dan mengamati kepentingan publik, yang mana output nya adalah menghasilkan kebijakan yang berorientasikan kepentingan bersama. Para pemimpin perempuan perlu mengamati secara objektif dan berdasarkan fakta mengenai situasi dan masalah yang dihadapi. Hal ini penting untuk memahami konteks dan kondisi yang ada sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat dan berdasarkan informasi yang akurat.
2. *Feelings* (Perasaan), setelah melakukan observasi, pemimpin perempuan mengidentifikasi dan mengungkapkan perasaan yang muncul sebagai respons terhadap observasi tersebut. Pemimpin perempuan perlu mengidentifikasi dan mengungkapkan perasaan yang muncul sebagai respons terhadap kondisi dan aspirasi publik.
3. *Needs* (Kebutuhan), unsur kebutuhan dalam NVC melibatkan identifikasi kebutuhan yang mendasari perasaan dan tindakan. Misalnya, apakah mereka menyoroti kebutuhan akan keadilan, kesetaraan gender, pembangunan ekonomi, atau partisipasi politik yang lebih inklusif. Dimana, kebutuhan tersebut tercipta dari aspirasi publik yang mendasari keinginan mereka, untuk tujuan bersama.
4. *Requests* (Permintaan), yang dimaksud adalah melibatkan kemampuan untuk secara jelas mengkomunikasikan apa yang diharapkan dari pihak lain untuk memenuhi kebutuhan yang diungkapkan. Permintaan berbeda dengan tuntutan. Permintaan akan dilihat sebagai tuntutan jika penerimanya meyakini bahwa mereka akan menerima hukuman jika permintaan tersebut tidak dipenuhi. Permintaan ini dapat berupa aksi nyata, kebijakan, atau kerjasama regional yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Mengkomunikasikan permintaan dengan jelas dan positif

membantu membangun kesepahaman dan kerjasama di antara masyarakat dan pemerintah

Setelah melalui proses NVC, parlemen perempuan juga menggunakan media baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, mereka turun ke lapangan dan bertemu langsung dengan masyarakat untuk berkomunikasi secara tatap muka. Selain itu, mereka juga memanfaatkan media seperti website yang dibuat oleh parlemen perempuan sebagai jembatan penghubung. Setelah proses penyerapan aspirasi, parlemen perempuan membawa aspirasi tersebut ke ruang parlemen dengan menerapkan teori retorika persuasif Aristoteles, yang terdiri dari tiga konsep utama yaitu ethos, pathos, dan logos. Aspirasi yang telah diserap oleh pemimpin perempuan kemudian dikomunikasikan di ruang parlemen dengan gaya komunikasi yang sesuai dengan konsep-konsep retorika persuasif tersebut.

Pada ruang parlemen, aspirasi akan diajukan dan diperjuangan dengan bekal gaya komunikasi yang dimiliki oleh parlemen perempuan, mengacu pada tiga konsep dari Teori Retorika, yaitu *Ethos, Pathos, Logos.* RUU tersebut akan dibawa parlemen perempuan mengacu pada kebijakan yang berorientasi terhadap logika induktif yang mana, harus memiliki argumen yang terorganisir dengan baik. Parlemen perempuan harus menyajikan fakta yang akurat, bukti yang relevan, dan argumen yang berdasarkan pemikiran rasional. Logos yang kuat akan dapat membantu membangun kepercayaan intelektual dan meyakinkan bahwa pandangan dan tindakan yang dilakukan adalah yang terbaik. Setelah dibentuknya kebijakan tersebut, maka efek yang dihasilkan akan memiliki 4 tujuan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh (Rosenberg, 2015), *Authenticity, Collaboration, Empathy,* dan *Freedom.*

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Pada sub-bab ini, akan dibahas mengenai kajian-kajian penelitian tedahulu yang dimaksudkan sebagai *review* atas berbagai penelitian yang telah ada dengan topik yang dianggap berhubungan dengan topik yang sedang diteliti. Di mana kajian penelitian terdahulu sangat berguna dan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dengan tidak hanya bersandarkan bahan pembanding atau pembeda namun juga dapat digunakan sebagai rujukan oleh peneliti untuk memperdalam dan memperkaya bahasan penelitian.

Penelitian terdahulu pertama ditulis oleh Edward Aspinal dkk, dengan judul *Women's Political Representation in Indonesia: Who Wins and How?*, pada penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya terhadap hambatan keterwakilan politik perempuan di Indonesia dan bagaimana cara kandidat perempuan mengatasinya (Aspinal, 2021). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi literatur/dokumentasi dan wawancara. Berdasarkan survei literatur dan berdasarkan tiga sumber data – temuan dari tiga belas tim peneliti yang mempelajari kandidat perempuan yang mencalonkan diri pada pemilu tahun 2019, survei terhadap 127 kandidat perempuan, dan survei perwakilan nasional terhadap warga negara Indonesia – artikel ini mengidentifikasi sikap patriarki yang tersebar luas sebagai salah satu tantangan yang signifikan di samping kelemahan struktural (Aspinal, 2021, hal. 5).

Dalam penelitian tersebut, menyoroti dua metode berbeda yang digunakan kandidat perempuan untuk mengatasi hambatan-hambatan: pertama, kelompok kandidat menargetkan pemilih perempuan dan memanfaatkan jaringan perempuan untuk memobilisasi apa yang disebut "modal homososial"; kedua, kelompok kandidat dinasti lainnya bergantung pada sumber daya politik dan keuangan dari kerabat (seringkali laki-laki) (Aspinal, 2021, hal. 6).

Temuan dalam penelitian ini adalah, terdapat kesenjangan gender yang besar dalam segala bentuk sumber daya yang dibutuhkan para kandidat untuk mencapai kesuksesan politik, termasuk sumber daya keuangan, akses terhadap jaringan elit, dan pengalaman kepemimpinan politik. Perempuan menghadapi prasangka dari partai politik dan masyarakat mengenai kapasitas mereka untuk mewakili komunitasnya, dimana itu adalah sebuah fakta yang peneliti lihat dan dikonfirmasi dalam survei mengenai sikap pemilih. Selain itu, peneliti jurnal ini juga mengatakan bahwa pengalaman di Indonesia menunjukkan bahwa sikap patriarki masih menjadi hal yang penting. Sebagian besar literatur yang meneliti dampak gender terhadap pilihan pemilih membahas Amerika Serikat atau negara-negara Barat lainnya, dan kesimpulannya adalah secara umum jenis kelamin seorang kandidat tidak berdampak negatif pada pilihan pemilih (Aspinal, 2021).

Penelitian ini juga mengungkapkan, metode kandidat perempuan dalam mengatasi hambatan-hambatan. Kandidat perempuan dalam mencari suara adalah menargetkan pemilih perempuan. Dari 127 kandidat perempuan yang disurvei, 39 persen mengatakan bahwa pemilih yang mereka targetkan adalah sekitar 40–60 persen perempuan. Kemudian, Sebanyak 40 persen lainnya mengatakan bahwa lebih dari 60 persen target pemilih mereka adalah perempuan, sementara hanya sekitar 13 persen mengatakan mereka menargetkan sebagian besar pemilih laki-laki (sisanya tidak memberikan tanggapan). Dengan kata lain, sejumlah besar kandidat perempuan menggunakan kampanye yang sangat bertarget gender, sebuah strategi yang layak dilakukan jika kita mengingat bahwa Indonesia dibawah sistem representasi proporsional (PR) terbuka (Aspinal, 2021, hal. 11-12).

Penelitian terdahulu kedua ditulis oleh Nankyung Choi, dengan judul penelitian *Women's political pathways in Southeast Asia,* pada penelitian ini peneliti memfokuskan kesenjangan antara teori normatif dan studi empiris yang bias elit mengenai kemajuan politik perempuan serta kondisi, proses dan hasil yang diamati di beberapa negara Asia Tenggara (Choi, 2018). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Etnografi. Penelitian ini mengidentifikasi tiga jalur utama yang ditempuh perempuan di Asia Tenggara dalam upaya pemilihan umum dan dipilih kembali untuk menduduki jabatan politik (Choi, 2018, hal. 1-2).

Pada penelitian tersebut, dikatakan terdapat tiga jalur utama yang ditempuh perempuan di Asia Tenggara dalam menduduki jabatan politik yaitu; *Elite Path, Middle Path*, dan *Grassroots Path* (Choi, 2018). Jalur politik yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah, mekanisme yang digunakan perempuan untuk memutuskan meraih jabatan dan kekuasaan politik, menjajaki pilihan-pilihan, memobilisasi sumber daya, mengembangkan jaringan atau hubungan dengan konstituen, dan membangun gaya politik yang berbeda (Choi, 2018). Jalur elit yang dimaksud adalah, berasal dari keluarga politis dan memiliki sumber daya keuangan yang baik. Biasanya, pada jalur ini ditujukan untuk mempertahankan dan memperluas prestasi keluarga. Memiliki koneksi dan dukungan dengan membawa nama keluarga. Misalnya; putri Presiden pertama Indonesia, Sukarno, yaitu Megawati Soekarnoputri, yang menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia pada tahun 2001 dan dipuji sebagai simbol kemajuan politik perempuan (Choi, 2018, hal. 6).

Jalur tengah yang dimaksud mencerminkan perubahan demografi, sosio-ekonomi dan kelembagaan di seluruh dan di dalam suatu negara. Jalur tengah yang muncul ini tampaknya menarik sebagian besar perempuan generasi muda, bukan dari latar belakang elitis atau secara tidak sengaja terjun ke dunia politik karena satu tujuan. Mereka tampaknya mengejar jabatan politik untuk mendapatkan akses terhadap pembuatan kebijakan, imbalan materi dan/atau prestise sosial (Choi, 2018, hal. 12). Biasanya pada jalur ini, mereka memulai karir atas saat-saat kritis dalam politik lokal; misalnya, ketika komunitas mereka

menjadi sangat kecewa terhadap politisi laki-laki yang korup, tidak peduli dan otoriter sehingga kemungkinan untuk "memberi kesempatan" kepada perempuan.

Tidak jauh berbeda dengan tujuan jalur tengah, Jalur *grassroots* atau akar rumput juga dilatarbelakangi oleh rasa frustrasi mereka terhadap kepemimpinan yang korup dan tidak kompeten atau termotivasi oleh isuisu masyarakat yang diabaikan oleh pemerintah daerah. Namun, Pada saat mereka memutuskan untuk mencalonkan diri dalam pemilu, mereka biasanya sudah memiliki pengalaman bertahun-tahun atau puluhan tahun bekerja di dan bersama komunitas lokal. Sebagian besar berasal dari latar belakang tidak mampu, perempuan-perempuan ini memulai pengalaman politik mereka di tingkat akar rumput sebagai pemimpin masyarakat atau mediator pelayanan publik atau kepala desa (Choi, 2018).

Penelitian terdahulu ketiga ditulis oleh, Sa'diyah El Adawiyah dkk, dengan judul "Strategi Komunikasi Politik Perempuan dalam Meraih Kepemimpinan Daerah". Fokus pada penelitian ini adalah proses komunikasi politik yang dibangun perempuan dalam meraih kepemimpinan daerah. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi dan menganalisis peranan perempuan pemimpin daerah sebagai komunikator politik dalam politik lokal, serta mengidentifikasi media dan saluran komunikasi politik yang digunakan perempuan pemimpin daerah dalam meraih kepemimpinan daerah. Selain itu adalah merumuskan strategi komunikasi politik perempuan pemimpin daerah dalam meraih kepemimpinan daerah (Adawiyah, Hubeis, Sumarti, & Susanto, 2019).

Metodologi penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan perempuan pemimpin daerah sebagai komunikator politik dalam politik lokal telah banyak mewarnai peta politik lokal, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, walaupun belum proporsional dengan jumlah keseluruhan kepala daerah dan amanat dari regulasi yang telah ada. Saluran komunikasi atau media yang umum digunakan oleh pemimpin daerah perempuan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan komunikasi dan juga komunikasi kelompok, baik secara langsung melalui pertemuan tatap muka dan melalui media sosial digital

yang ada saat ini. Pemanfaatan saluran media tersebut dirasakan efektif untuk memperkenalkan diri, meningkatkan popularitas dan elektabilitas dari tokoh perempuan pemimpinan daerah tersebut. Strategi komunikasi politik perempuan pemimpin daerah dalam meraih kepemimpinan daerah memiliki tiga tahapan, yaitu strategi membangun jejaring, strategi pengemasan pesan dan strategi penentuan media (Adawiyah, Hubeis, Sumarti, & Susanto, 2019).

Komunikasi politik yang dilakukan oleh Perempuan dalam menduduki kepemimpinan daerah pada penelitian ini terdapat 3 yaitu, pertama, Strategi membangun jejaring, dimana dalam strategi ini terdapat tiga yaitu, Jejaring relawan, jejaring parpol pendukung, dan jejaring pemilih/konstituen. Jejaring relawan seperti menekankan terhadap aspek, Janji politik, Kompetensi diri, dan Tokoh masyarakat. Aspek pada jejaring parpol pendukung, ditujukan terhadap Kompetensi diri, Materi, dan Kesamaan ideologi. Sedangkan, dalam jejaring pemilih, ditekankan terhadap aspek Janji politik, Budaya, Tokoh Masyarakat, dan Kompetensi Diri (Adawiyah, Hubeis, Sumarti, & Susanto, 2019, hal. 103).

Pada strategi pengemasan pesan, dibagi pada dua kategori, yaitu isi pesan dan struktur pesan. Untuk isi pesan, ditekankan terhadap Visualisasi pesan, Pendekatan emosional, Pendeketan kelompok rujukan, dan Kreativitas juga Humor. Kemudian, strategi komunikasi politik terakhir yang digunakan adalah Strategi membangun media. Dimana, media lah yang membangun citra positif mereka di mata konstituennya. Hingga menjadi buah bibir pembicaraan orang yang mengatakan bahwa seleksi kandidat diawali oleh peran media massa yang membentuk image (Adawiyah, Hubeis, Sumarti, & Susanto, 2019, hal. 107).

Penelitian terdahulu keempat, ditulis oleh Puspa Hestianti dkk, dengan judul *"Women's Political Communication: The Case Study of Karolin Margret Natasa",* penelitian ini membahas studi kasus Karolin Margret Natasa dan komunikasi politiknya di Instagram. Kajian ini berfokus pada penggunaan media sosial sebagai cara efektif dalam komunikasi politik, dengan fokus pada teori Aristoteles tentang Ideologi Komunikatif, Kualitas Emosional, dan Argumen Inti. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan data yang dikumpulkan dari Instagram dan dianalisis menggunakan software NVivo.

Penelitian menemukan bahwa komunikasi politik Karolin di Instagram terdiri dari 15% Ideologi Komunikatif, 19% Kualitas Emosional, dan 65% Argumen Inti. Artikel ini menyoroti pentingnya kesetaraan gender dalam politik dan tantangan yang dihadapi perempuan dalam memasuki dunia politik.

Komunikasi politik perempuan di bidang politik dibahas dalam teks ini, khususnya dalam hal partisipasi dan keterwakilan mereka di lembaga legislatif. Strategi komunikasi perempuan dieksplorasi, termasuk strategi komunikasi politik dan komunikasi *door-to-door*. Penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi, khususnya untuk komunikasi persuasif, menjadi sorotan. Teks tersebut juga menyebutkan kasus spesifik Karolin, Bupati Kabupaten Landak, yang aktif menggunakan Instagram untuk komunikasi politik. Analisis postingan media sosialnya menunjukkan fokus pada argumen inti, dengan lebih sedikit penekanan pada kualitas emosional dan ideologi komunikatif. Teks tersebut diakhiri dengan membahas kategori ideologi komunikatif yang terdapat pada postingan Karolin, seperti budaya, gender, Pancasila, dan pluralisme.

Dari analisis menggunakan NVivo 12 plus, muncul tiga bentuk substansi dalam komunikasi politik Karolin melalui media sosial Instagram miliknya. Bentuknya antara lain simpati kepada masyarakat, komunikasi bermakna terkait pelayanan sosial, dan kampanye politik. Simpati kepada masyarakat mencakup apresiasi dan dukungan terhadap kegiatan dan komunitas di Distrik Landak. Komunikasi bermakna terkait bakti sosial menitikberatkan pada pembagian kegiatan bakti sosial kepada masyarakat Bupati Landak. Kegiatan kampanye politik dilakukan untuk kepentingan pribadi dan partai. Penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi politik dapat memberikan dampak positif dan negatif. Komunikasi politik Karolin di media sosial didominasi oleh argumen inti yang menarik perhatian masyarakat terhadap aktivitas politiknya. Namun, pesan dengan kualitas emosional dan ideologi komunikatif juga harus dipertimbangkan. Pemanfaatan Instagram oleh Karolin sebagai saluran komunikasi politik dinilai efektif mengingat pesatnya kemajuan teknologi informasi..

Penelitian terdahulu kelima, ditulis oleh Theresia Parwati dengan judul "Partisipasi dan Komunikasi Politik Perempuan di Legislatif Menurut Kacamata Politisi Perempuan di Indonesia", dengan fokus penelitian pada partisipasi politik perempuan di Indonesia masih rendah, dipengaruhi oleh faktor internal seperti ketidakpercayaan diri dan konflik peran, serta faktor eksternal seperti budaya patriarki dan kendala dalam kompetisi politik (Parwati & Istiningdiah, 2020).

Pada penelitian ini menggunakan konsep komunikasi politik, dengan metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode dan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunkan anggota DPR RI/DPRD Perempuan Tahun 2019-2024 dan beberapa politisi perempuan sebagai responden. Temuan utama penelitian adalah bahwa rendahnya partisipasi perempuan dalam politik dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, termasuk ketidakpercayaan diri, konflik peran, nilai budaya patriarki, dan kendala dalam kompetisi politik. Politisi perempuan juga menghadapi hambatan eksternal seperti sistem budaya patriarki yang memperlakukan laki-laki lebih unggul dan rendahnya pendidikan politik oleh partai politik (Parwati & Istiningdiah, 2020).

Sebagai solusi, penelitian menyarankan perubahan mindset laki-laki dan perempuan, pemberian pelatihan komunikasi politik bagi perempuan, peningkatan kualitas politisi perempuan, serta pembentukan kebijakan yang mengedepankan kesetaraan gender. Dalam konteks ini, komunikasi politik menjadi kunci penting untuk memperkuat partisipasi politik perempuan. Komunikasi politik yang efektif dapat memberikan akses lebih luas bagi perempuan dalam proses politik dan menyuarakan aspirasi mereka secara efektif. Meskipun politisi perempuan menghadapi banyak hambatan, penting bagi perubahan masyarakat dan kesejahteraan perempuan bahwa partisipasi politik perempuan diperkuat dan diakui secara lebih luas dalam arena politik (Parwati & Istiningdiah, 2020).

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

Judul & Penulis	Fokus Penelitian	Pendekatan & Metode	Teori & Konsep	Hasil Penelitian	Perbandingan dengan Riset Peneliti
"Women's Political Representation in Indonesia: Who Wins and How?," Edward Aspinal dkk	Fokus penelitian terhadap hambatan keterwakilan politik perempuan di Indonesia dan bagaimana cara kandidat perempuan mengatasinya.	Metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi literatur atau dokumentasi dan wawancara.	- Gender - Women's Political Representa-tion	Hasil penelitian ini membagi menjadi 2 metode dalam mengatasi hambatan; pertama, kelompok kandidat menargetkan pemilih perempuan. Kedua, kelompok kandidat dinasti lainnya bergantung pada sumber daya politik dan keuangan dari kerabat	Penelitian yang ditulis Edward Aspinal memiliki tujuan penelitian untuk mengidentifikasi sikap patriarki yang menjadi penghambat dalam keterwakilan politik perempuan di negara Asia Tenggara. Pembeda dengan riset peneliti terletak pada tujuan penelitian yang tidak hanya membahas mengenai hambatan melainkan juga bagaimana pola komunikasi politik pemimpin perempuan terhadap kebijakan.
"*Women's political pathways in Southeast Asia"* Nankyung Choi	Pada penelitian ini peneliti memfokuskan kesenjangan antara teori normatif dan studi empiris yang bias elit mengenai kemajuan politik	Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Etnografi	- Women and politics - Normative Theories - Elite-biased	Hasil penelitian ini menunjukan tiga jalur utama yang ditempuh perempuan di Asia Tenggara dalam menduduki jabatan politik yaitu; *Elite Path, Middle*	Penelitian yang ditulis oleh Nankyung Choi bertujuan untuk menjelaskan kompleksitas kemajuan politik perempuan dalam politik lokal dan berkontribusi

	perempuan serta kondisi, proses dan hasil yang diamati di beberapa negara Asia Tenggara			*Path*, dan *Grassroots Path.* Jalur politik yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah, mekanisme yang digunakan perempuan untuk memutuskan meraih jabatan dan kekuasaan politik.	pada teorisasi perempuan dalam politik di Asia Tenggara. Pembeda dengan riset peneliti yaitu peneliti fokus terhadap pola komunikasi politik pemimpin perempuan dan menggunakan teori persuasi dan pendekatan NVC dalam hasil penelitian.
"Strategi Komunikasi Politik Perempuan dalam Meraih Kepemimpinan Daerah" Sa'diyah El Adawiyah dkk	Fokus pada penelitian ini adalah proses komunikasi politik yang dibangun perempuan dalam meraih kepemimpinan daerah	Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.	- Strategi Komunikasi politik - Komunikasi politik	Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat 3 strategi yang digunakan perempuan dalam menduduki kepemimpinan daerah, pertama, Strategi membangun jejaring, kedua strategi pengemasan pesan, dan terakhir strategi komunikasi politik.	Penelitian yang ditulis oleh Sa'diyah El Adawiyah dkk memiliki tujuan penelitian pada identifikasi dan menganalisis peranan perempuan pemimpin daerah sebagai komunikator politik dalam politik lokal. Pembeda dengan riset penulis adalah terletak pada tujuan penelitian yang mengarah pada pola komunikasi politik pemimpin perempuan terhadap regulasi, hambatan, dan aspirasi publik.
"Women's Political Communication : The Case	Penelitian ini berfokus pada penggunaan media sosial sebagai cara efektif dalam	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan	- Komunikasi Politik - Gender	Penelitian menemukan bahwa komunikasi politik Karolin di Instagram terdiri dari 15% Ideologi	Penelitian yang ditulis oleh Puspa Hestianti dkk memiliki fokus pada penggunaan media sosial

Study of Karolin Margret Natasa" Puspa Hestianti dkk	komunikasi politik, dengan fokus pada teori Aristoteles tentang Ideologi Komunikatif, Kualitas Emosional, dan Argumen Inti.	data yang dikumpulkan dari Instagram dan dianalisis menggunakan software NVivo.		Komunikatif, 19% Kualitas Emosional, dan 65% Argumen Inti. Artikel ini menyoroti pentingnya kesetaraan gender dalam politik dan tantangan yang dihadapi perempuan dalam memasuki dunia politik.	sebagai cara efektif dalam komunikasi politik. Pembeda dengan riset peneliti adalah peneliti menggunakan informan secara langsung dalam proses penelitian, tidak ada proses pengamatan melainkan studi pustaka dan wawancara intensif.
"Partisipasi dan Komunikasi Politik Perempuan di Legislatif Menurut Kacamata Politisi Perempuan di Indonesia" Theresia Parwati dan Kuspuji Istiningdiah	Penelitian ini berfokus pada partisipasi politik perempuan di Indonesia masih rendah, dipengaruhi oleh faktor internal seperti ketidakpercayaan diri dan konflik peran, serta faktor eksternal seperti budaya patriarki dan kendala dalam kompetisi politik	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode dan jenis penelitian deskriptif	Komunikasi Politik	Temuan dari penelian ini adalah bahwa rendahnya partisipasi perempuan dalam politik dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, termasuk ketidakpercayaan diri, konflik peran, nilai budaya patriarki, dan kendala dalam kompetisi politik. Politisi perempuan juga menghadapi hambatan eksternal seperti sistem budaya patriarki yang memperlakukan laki-laki lebih unggul dan rendahnya pendidikan politik oleh partai politik	Penelitian yang ditulis oleh Theresia Parwati dkk, memiliki fokus pada mengapa partisipasi perempuan dalam politik di lembaga formal relatif rendah dan bagaimana peran komunikasi dalam hal tersebut. Pembeda dengan riset peneliti adalah terletak pada informan kunci, dimana peneliti menggunakan informan DPR RI, Parlemen Thaildn dan Filipina.

Data Diolah oleh Peneliti

Penelitian terdahulu memberikan gambaran baru bagi peneliti dalam memahami berbagai metode yang digunakan. Beberapa penelitian terdahulu juga telah mampu memberikan gambaran baru bagi peneliti untuk memahami kepemimpinan perempuan ditinjau dari perspektif gender dan kedudukan nya di kursi politik. Penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan wawasan bagi peneliti dalam memperkaya kerangka konseptual penelitian. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan adalah, penulis melakukan riset terkait "Pola Komunikasi Politik Pemimpin Perempuan ASEAN Dalam Menyalurkan Aspirasi Publik (Studi Deskriptif Empat negara Yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand)".

Dimana, belum banyak penelitian yang dilakukan terkait pola komunikasi politik kepemimpinan perempuan di negara-negara ASEAN, terutama dalam hal menyalurkan aspirasi publik. Penggambaran tentang komunikasi politik pemimpin perempuan ASEAN hasil riset ini bermanfaat menambah literasi pengetahuan mengenai studi gender dalam lingkup regional ASEAN. Juga menambah pengetahuan di bidang ilmu komunikasi. Apalagi dalam penelitian ini akan diterapkan teori Persuasi dan Pendekatan *nonviolent communication* yang masih jarang digunakan dalam penelitian komunikasi. Laporan penelitian ini juga dapat memberikan informasi tentang tumbuhnya kepemimpinan perempuan yang terbukti dalam berbagai laporan dari institusi dan organisasi kepemimpinan perempuan banyak membantu program pembangunan masyarakat di berbagai sektor seperti, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, atau kesejahteraan perempuan, serta pelestarian lingkungan, yang mana partisipasi dan kepemimpinan perempuan yang setara dalam kehidupan politik dan publik sangat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, demokrasi, dan masyarakat yang lebih adil.

2.2. Landasan Teori

Penelitian terdahulu yang telah dipaparkan sebelumnya telah membantu peneliti dalam memetakan kerangka teoritis bagi penelitian ini. Di mana penulis menggunakan teori Persuasi dan pendekatan *Nonviolent Communication* dalam

melakukan riset terkait “Pola Komunikasi Politik Pemimpin Perempuan ASEAN Dalam Menyalurkan Aspirasi Publik (Studi Deskriptif Empat negara Yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand)”.

2.2.1. Teori Retorika Persuasi

(Burke, 1969, hal. 72) menyatakan bahwa "di mana pun ada persuasi, di situ ada retorika. Dan di mana pun ada makna, di situ ada persuasi", dan ini memang merupakan pernyataan yang tepat untuk menekankan persuasifnya retorika. Retorika ada dalam setiap jenis komunikasi dan memiliki persuasi sebagai inti. Retorika didefinisikan sebagai "kemampuan, dalam setiap kasus tertentu, untuk melihat cara-cara persuasi yang tersedia" (Aristotle, 1954). Untuk berhasil meyakinkan audiens, tiga pendekatan persuasif penting diidentifikasi—ethos, pathos, dan logos—yang sesuai dengan persona pembicara, emosi audiens, dan alasan pesan. Dalam kata-kata Aristoteles:

> “…*of the modes of persuasion furnished by the spoken word there are three kinds. The first kind depends on the personal character of the speaker; the second on putting the audience into a certain frame of mind; the third on proof, or apparent proof provided by the words of the speech itself.* “ (Aristotle, 1954).

Tujuan utama dari penulisan persuasif adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa gagasan yang diberikan valid dan lebih unik daripada yang lain. Aristoteles membagi definisi pendekatan dan persuasi menjadi tiga klasifikasi: ethos, pathos, dan logos. Definisi-definisi tersebut diberikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 2.2 Definisi Konsep Ethos, Pathos dan Logos

Ethos	The art of convincing by the character of an author is referred to as Ethos (i.e. credibility), or ethical appeal. There is a tendency of believing people whom we respect. Projecting an impression to the reader that you are someone worth listening to is one of the central problems of argumentation, in other terms placing yourself as an author of an authority on the paper’s subject, as well as a person who is both worthy of respect and likable
Pathos	The art of persuading by means of appealing to the emotions of readers is referred to as Pathos (i.e. emotional). Seeing how pathos, emotional appeals, are used to persuade can be based on texts ranging from classic essays to contemporary advertisements. An audience's emotional response can be affected by the choice of language, and an argument can be enhanced through the use of an effective emotional appeal.
Logos	Logos (i.e. logical) refers to a reasoning-based persuading. Deductive and inductive reasoning shall also be considered, as well as the discussion of what leads to a persuasive as well as an effective reason for the backup of claims. The heart of argumentation is based on ‘giving reasons’, and it cannot be over-emphasised. Kinds

of support that could be used to authenticate a thesis shall be studied, as well as consideration of some logical fallacies that are common, in order to avoid them while writing.

Sumber: (Aristotle, Rhetoric. Edited by Ross, W.D., 1959)

Aristoteles merupakan murid filsuf Yunani Plato, dianggap sebagai salah satu filsuf terhebat dalam sejarah dan tokoh yang bertanggung jawab atas tiga seruan retorika yang menjadi landasan studi retoris modern. Aristoteles mendefinisikan tiga daya tarik retoris yang berbeda karena berkaitan dengan seni persuasi: ethos (kredibilitas retorika), logos (logika atau rasionalitas), dan pathos (emosi) (Lutske, 2009).

Beberapa konsep kunci dalam Teori Retorika yang sering digunakan dalam politik meliputi, *ethos, pathos,* dan *logos.* Ethos adalah sifat karakter, kecerdasan, atau pengetahuan yang luas. Kredibilitas memiliki peran penting karena orang tidak hanya dipengaruhi oleh bukti yang disajikan, tetapi juga oleh siapa yang menyajikan bukti tersebut. Kredibilitas ditentukan oleh tingkat keahlian dan kepercayaan, yang tercermin dalam kecerdasan, keahlian, wawasan, pengetahuan, dan pengalaman seseorang. Kepercayaan juga melibatkan pandangan komunikan terhadap komunikator yang terkait dengan karakternya, seperti kejujuran, moralitas, etika, keadilan, dan sikap sopan. Aristoteles merujuk pada aspek-aspek ini sebagai *good moral character* (Lucas, 2007).

Selain kredibilitas, atraksi (daya tarik) dan kekuasaan (sumber kekuatan) juga merupakan bagian dari dimensi ethos. Atraksi melibatkan daya tarik komunikator yang bisa bersumber dari penampilan fisik atau kesamaan antara komunikator dan komunikan, sehingga memudahkan komunikan menerima pesan dari komunikator (Lucas, 2007). Kekuasaan merujuk pada kemampuan untuk menciptakan ketaatan melalui interaksi antara komunikator dan komunikan.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan pathos adalah, komunikator harus menyentuh hati khalayak melalui perasaan, emosi, harapan, kebencian, dan kasih sayang. Para ahli retorika modern menyebutnya imbauan emosional. Dapat dikatakan, memersuasi komunikan secara emosional lebih cepat diterima dari pada secara logika (Lucas, 2007). Sementara logos diartikan sebagai imbauan

logis yang ditunjukkan oleh pembicara bahwa uraiannya masuk akal sehingga patut untuk diikuti dan dilaksanakan oleh khalayak.

2.2.2. Pendekatan *Nonviolent Communication* (NVC)

Pendekatan *Nonviolent Communication* (NVC) merupakan sebuah pendekatan komunikasi yang dilandasi oleh prinsip-prinsip nonkekerasan. *Nonviolent Communication,* adalah cara berkomunikasi yang menuntun kita menciptakan empati dalam percakapan (Rosenberg, 2015). NVC didasarkan pada keterampilan bahasa dan komunikasi yang memperkuat kemampuan kita untuk tetap menjadi manusiawi, bahkan dalam kondisi sulit yang menekan. Tujuannya adalah untuk mengingatkan bahwasannya sebagai manusia kita diharuskan untuk saling terhubung satu sama lainnya dan untuk saling membantu dalam menjalani hidup.

NVC adalah proses komunikasi yang dikembangkan oleh Marshall Rosenberg, Ph.D., dan sering disebut sebagai "*compassionate communication*". NVC memandu kita dalam mengubah cara kita mengekspresikan diri dan mendengarkan orang lain. NVC melatih untuk mengamati dengan cermat, dan mampu menentukan kondisi apa yang sedang memengaruhi kita. Dimana, secara tidak langsung hal tersebut akan membantu kita belajar untuk mengidentifikasi dan mengartikulasikan dengan jelas apa yang sebenarnya kita inginkan dalam situasi tertentu (Rosenberg, 2015, hal. 3).

NVC adalah alat komunikasi dengan tujuan pertama-tama menciptakan empati dalam percakapan. Idenya adalah ketika ada empati di antara pihak-pihak yang terlibat dalam percakapan, maka akan lebih mudah untuk membicarakan solusi yang memenuhi kebutuhan mendasar semua pihak. Rosenberg mengatakan bahwa *Nonviolence* bukanlah sebuah strategi yang dapat digunakan saat ini dan dibuang besok; *Nonviolence* bukanlah sesuatu yang membuat seseorang lemah lembut atau penurut. *Nonviolence* adalah tentang menanamkan sikap-sikap positif untuk menggantikan sikap-sikap negatif yang mendominasi kita (Rosenberg, 2015). NVC lebih dari sekedar proses atau bahasa, pada tingkat yang lebih dalam,

ini merupakan pengingat untuk menjaga perhatian kita terfokus pada tempat di mana kita lebih berpeluang mendapatkan apa yang kita cari (Rosenberg, 2015).

NVC dinilai dapat mengubah potensi konflik menjadi dialog perdamaian. Rosenberg membagi NVC kedalam empat komponen model, yaitu *Observations, Feelings, Needs*, dan *Requests* (Rosenberg, 2015, hal. 6). Pertama, adalah bentuk pengamatan (*Observation)*. Dimana, mengamati apa yang sebenarnya terjadi tanpa memberikan penilaian atau evaluasi apapun. Selanjutnya (*feelings*), komponen kedua, dimana setelah proses 'mengamati', kita nyatakan apa yang kita rasakan saat kita mengamati. Kemudian yang ketiga *(needs),* kita mengatakan apa 'kebutuhan' kita yang berhubungan dengan 'perasaan' yang telah kita identifikasi. Kemudian komponen terakhir *(requests),* adalah merupakan suatu tindakan yang kita 'minta' sebagai bentuk dari apa yang kita 'butuhkan' sebelumnya.

Bagan 2.2 Empat Komponen *Nonviolence Communication*

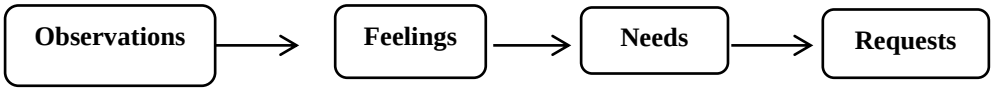

Sumber: (Rosenberg, Nonviolent Communication: A Language of Life 3rd Edition, 2015)

Terdapat dua bagian dari NVC (Rosenberg, 2015, hal. 7):

1. Mengungkapkan secara jujur melalui empat komponen
2. Menerima secara empati melalui empat komponen

Secara ringkas, NVC memandu dalam mengekspresikan diri dan mendengarkan orang lain dengan memfokuskan kesadaran kita pada empat bidang: apa yang kita amati, rasakan, dan butuhkan, dan apa yang kita minta. NVC memupuk sikap mendengarkan yang mendalam, rasa hormat, dan empati serta melahirkan keinginan bersama untuk memberi dari hati.

a. Observations

Komponen pertama NVC adalah *Observations*, yang mengacu terhadap fakta. Pada komponen ini memerlukan pemisahan observasi dari evaluasi. Kita perlu mengamati dengan jelas apa yang kita lihat, dengar, atau sentuh yang

memengaruhi perasaan sejahtera kita, tanpa mencampurkan penilaian apa pun. Observasi adalah elemen penting dalam NVC, di mana kita ingin mengungkapkan dengan jelas dan jujur bagaimana keadaan kita kepada orang lain. Ketika kita menggabungkan observasi dengan evaluasi, kita mengurangi kemungkinan orang lain mendengar pesan yang kita maksudkan. Sebaliknya, mereka cenderung mendengarkan kritik dan menolak apa pun yang kita katakan (Rosenberg, 2015). NVC tidak mengamanatkan bahwa kita harus tetap objektif dan tidak melakukan evaluasi. Hal ini hanya mengharuskan kita menjaga pemisahan antara observasi dan evaluasi kita. NVC adalah bahasa proses yang mencegah generalisasi statis; sebaliknya, evaluasi harus didasarkan pada pengamatan yang spesifik pada waktu dan konteks.

Pada komponen pertama ini, menjelaskan bahwasannya bagaimana setiap permasalahan harus dijelaskan dahulu latar belakang nya sebelum kita men-justifikasi permasalahan tersebut. Pada buku ini juga Rosenberg mengatakan bahwa harus dapat mengamati apa yang benar-benar terjadi dalam sebuah situasi, harus mampu mengartikulasikan pengamatan itu tanpa memasukkan penilaian atau evaluasi.

b. Feelings

Feelings, didefinisikan sebagai emosi atau sensasi yang terbebas dari pikiran maupun cerita. Perasaan disampaikan untuk menunjukkan apakah kebutuhan kita telah terpenuhi atau belum. Dengan mengidentifikasi perasaan, maka memastikan komunikasi dapat terjalin dan membantu menyelesaikan konflik (Rosenberg, 2015). Komponen kedua ini diperlukan sebagai bentuk ekspresi diri. Dengan mengembangkan kosakata perasaan yang memungkinkan kita menyebutkan atau mengidentifikasi emosi kita dengan jelas dan spesifik, kita dapat lebih mudah terhubung satu sama lain. Membiarkan diri kita menjadi rentan dengan mengungkapkan perasaan kita dapat membantu menyelesaikan konflik. NVC membedakan ekspresi perasaan sebenarnya dengan kata-kata dan pernyataan yang menggambarkan pemikiran, penilaian, dan interpretasi (Rosenberg, 2015, hal. 46).

c. *Needs*

Needs, Komponen ketiga dari NVC memerlukan pengakuan akan akar perasaan kita. NVC meningkatkan kesadaran kita bahwa apa yang dikatakan dan dilakukan orang lain mungkin merupakan stimulus, namun tidak pernah menjadi penyebab perasaan kita. Kita melihat bahwa perasaan kita dihasilkan dari cara kita memilih untuk menerima apa yang dikatakan dan dilakukan orang lain, serta dari kebutuhan dan harapan khusus kita pada saat itu (Rosenberg, 2015, hal. 49).

Pada komponen ini terdapat hubungan antara perasaan dan kebutuhan, oleh karena itu seperti yang telah disampaikan diatas, bahwasannya *'needs'* merupakan *'the roots of feelings'.* Penilaian, kritik, diagnosis, dan penafsiran orang lain semuanya merupakan ekspresi kebutuhan kita yang terasing (Rosenberg, 2015). Ketika kita mengungkapkan kebutuhan kita secara tidak langsung melalui penggunaan evaluasi, interpretasi, dan gambaran, orang lain kemungkinan besar akan mendengar kritik. Oleh karena itulah, seharusnya kita dapat mengekspresikan 'kebutuhan' kita dengan 'perasaan', agar orang lain dapat merespons dengan belas kasih.

d. *Requests*

Requests, Komponen keempat membahas apa yang ingin kita minta dari orang lain untuk hidup kita. Ketika kebutuhan kita tidak terpenuhi, kita mengikuti ekspresi dari apa yang kita amati, rasakan, dan butuhkan dengan permintaan khusus: kita meminta tindakan yang mungkin memenuhi kebutuhan kita (Rosenberg, 2015).

Permintaan berbeda dengan tuntutan. Karena dalam permintaan, seseorang akan terbuka untuk mendengar jawaban "tidak" tanpa adanya upaya pemaksaan. Dalam hal ini, ia perlu berempati dengan cara mengetahui alasan orang lain enggan menyetujuinya. Permintaan kita diterima sebagai tuntutan ketika orang lain yakin mereka akan disalahkan atau dihukum jika mereka

tidak mematuhinya. Ketika orang mendengar suatu tuntutan, mereka hanya melihat dua pilihan: tunduk atau memberontak. Apa pun yang terjadi, orang yang meminta dianggap bersifat memaksa, dan kapasitas pendengar untuk menanggapi permintaan tersebut dengan penuh belas kasih menjadi berkurang (Rosenberg, 2015, hal. 79).

2.3. Landasan Konseptual

2.3.1. Komunikasi Politik

Kajian tentang komunikasi politik dibagi menjadi dua bagian, yaitu definisi komunikasi politik dan teori yang diterapkan dalam penelitian tersebut. Secara prinsip, terdapat dua pendekatan dalam komunikasi politik: satu fokus pada aspek politik yang lebih dominan, sementara yang lain lebih menekankan dimensi komunikasinya (Trenggono, 2021). Dalam analisis komunikasi politik, kedua pendekatan ini sering digunakan bersamaan. Pendekatan dari ilmu politik cenderung menganggap komunikasi politik sebagai bagian integral dari sistem politik, sementara pendekatan dari ilmu komunikasi melihat komunikasi politik sebagai sarana komunikasi yang mengatur kehidupan politik (Trenggono, 2021).

Dalam bukunya *Handbook of Political Communication*, Nimmo dan Sanders (1981) menelusuri perkembangan bidang komunikasi politik sebagai suatu disiplin akademis pada paruh kedua abad ke-20, dan para sarjana lain telah menjelaskan luas dan ruang lingkup komunikasi politik. Banyak definisi komunikasi politik yang telah dikemukakan, namun tidak ada satupun yang diterima secara universal. Mungkin yang terbaik adalah yang paling sederhana: Steven H. Chaffee, mengatakan bahwa komunikasi politik adalah “peran komunikasi dalam proses politik” (Chaffee, 1975, hal. 15)

Selain itu, Nimmo juga mengatakan bahwasannya Komunikasi politik bukanlah suatu disiplin atau bidang yang dibedakan berdasarkan cara penjelasannya, melainkan suatu kajian yang dipandu oleh fenomena yang dijelaskannya (Nimmo, 1981). Selama dasawarsa ini, label komunikasi politik mulai dipakai untuk menjabarkan proses campur tangan dari lembaga politik dan

warga negara yang saling berinteraksi serta “pengaruh politik dikerahkan dan disebarkan” (Nimmo, 1981, hal. 12). Namun, menurut McNair (McNair, 1995) Walter Lippmann sudah mengangkat kajian opini publik pada tahun 1922 sebagai bidang komunikasi politik.

Merujuk pada topik yang dibahas penulis, komunikasi politik menjadi salah satu konsep pendukung analisis penelitian. Komunikasi politik menjadi sarana untuk mempengaruhi opini publik, membangun dukungan politik, dan memfasilitasi partisipasi publik dalam pembangunan demokrasi. Kepemimpinan wanita dalam komunikasi politik juga berperan penting dalam menyalurkan aspirasi publik. Wanita sebagai pemimpin memiliki perspektif yang unik dan dapat membawa isu-isu yang relevan dengan kepentingan perempuan dan masyarakat secara umum ke dalam agenda politik. Melalui komunikasi politik yang efektif, pemimpin perempuan dapat memperjuangkan hak-hak perempuan, mengatasi kesenjangan gender, dan mempromosikan keadilan sosial.

Dalam konteks kepemimpinan perempuan di negara-negara ASEAN, komunikasi politik menjadi sarana yang penting untuk memperkuat peran perempuan dalam mendukung pembangunan demokrasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Melalui komunikasi yang efektif, pemimpin perempuan dapat membangun kepercayaan, memobilisasi dukungan, dan mempengaruhi opini publik dalam upaya mencapai kesetaraan gender dan memperjuangkan kepentingan masyarakat secara luas.

2.3.2. Pola Komunikasi

Pola komunikasi merujuk pada cara aktor berinteraksi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses menggunakan strategi dan metode tertentu. Adapun secara umum, pola komunikasi itu merupakan cara seseorang atau kelompok itu berkomunikasi. Terdapat empat (4) pola komunikasi secara umum, yaitu pola komunikasi primer, sekunder, linear, dan sirkuler. Pola Komunikasi Primer, merupakan suatu proses penyampaian pikiran oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan suatu simbol sebagai media atau saluran. Dalam pola ini terbagi menjadi dua lambang, yaitu lambang verbal dan nonverbal.

Lambang verbal yaitu bahasa sebagai lambang verbal yang paling banyak dan paling sering digunakan, karena bahasa mampu mengungkapkan pikiran komunikator. Lambang nirverbal yaitu lambang yang digunakan dalam berkomunikasi selain bahasa, merupakan isyarat dengan anggota tubuh antara lain mata, kepala, bibir, dan tangan. Selain itu, gambar juga sebagai lambang komunikasi nirverbal, sehingga dengan memadukan keduanya maka proses komunikasi dengan pola ini akan lebih efektif (Onong Uchjiyana Efendy, 2006).

Selain itu terdapat Pola Komunikasi Sekunder, merupakan penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang pada media pertama. Komunikator menggunakan media kedua ini karena yang menjadi sasaran komunikasi yang jauh tempatnya, atau banyak jumlahnya. Dalam proses komunikasi secara sekunder ini semakin lama akan semakin efektif dan efisien, karena didukung oleh teknologi komunikasi yang semakin canggih. Pola komunikasi ini didasari atas model sederhana yang dibuat Aristoteles, sehingga mempengaruhi Harold D. Lasswell, seorang sarjana politik Amerika yang kemudian membuat model komunikasi yang dikenal dengan formula Lasswell pada tahun 1984 (Cangara H. , 2018). Bila melihat formula Lasswell, proses komunikasi selalu mempunyai efek dan penggaruh terhadap khalayak, sehingga mengabaikan faktor tanggapan balik atau efeknya. Dalam formula Lasswell ini, ada lima unsur yang dibahas yaitu siapa, mengatakan apa, melalui apa, kepada siapa dan apa akibatnya. Dengan adanya unsurunsur tersebut, memberi pengertian bahwa proses komunikasi ini menyangkut siapa, yaitu siapa yang menyampaikan pesan atau memberikan informasi yang berarti komunikator (Mulyana, 2005).

Selanjutnya terdapat Pola Komunikasi Linear, dimana Linear di sini mengandung makna lurus yang berarti perjalanan dari satu titik ke titik lain secara lurus, yang berarti penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan sebagai titik terminal. Jadi dalam proses komunikasi ini biasanya terjadi dalam komunikasi tatap muka (*face to face*), tetapi adakalanya komunikasi bermedia. Dalam proses komunikasi ini, pesan yang disampaikan akan efektif apabila ada perencanaan sebelum melaksanakan komunikasi. Shannon bersama Weaver pada

tahun 1949 menerapkan proses komunikasi manusia (*human communication*) yang berakar dari teori matematik dalam komunikasi permesinan (*engineering communication*). Model matematikal tersebut menggambarkan komunikasi sebagai proses linear (Onong Uchjiyana Efendy, 2006, hal. 257).

Terakhir, terdapat Pola Komunikasi Sirkuler yang merupakan Salah satu pola yang digunakan untuk menggambarkan proses komunikasi adalah pola sirkuler yang dibuat oleh Osgood bersama Schramm. Kedua tokoh ini mencurahkan perhatian mereka pada peraan sumber dan penerima sebagai pelaku utama komunikasi (Cangara H. , 2018). Pola ini menggambarkan komunikasi sebagai proses yang dinamis, di mana pesan ditranmisit melalui proses encoding dan decoding. Encoding adalah transilasi yang dilakukan oleh sumber atas sebuah pesan, dan decoding adalah transilasi yang dilakukan oleh penerima terhadap pesan yang berasal dari sumber. Hubungan antara encoding dan decoding adalah hubungan antara sumber dan penerima secara stimultan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pola komunikasi Sirkuler untuk menjelaskan komunikasi yang dilakukan oleh pemimpin perempuan ASEAN.

2.3.3. Pola Komunikasi Sirkuler

Orientasi pengertian komunikasi sebagai suatu proses adalah bahwa komunikasi itu proses yang kompleks, berlanjut dan tidak bisa berubah dengan sendirinya. Wilbur Schramm dan Charles E. Osgood, mengatakan bahwa komunikasi sirkuler menitik beratkan pembahasan pada perilaku pelaku-pelaku utama dalam proses komunikasi. Menurut Schramm (1954), komunikasi senantiasa membutuhkan setidaknya tiga unsur, yaitu sumber (*source*), pesan (*message*) dan sasaran (*destination*). Sumber boleh jadi seorang individu (berbicara, menulis, menggambar, memberi isyarat) atau suatu organisasi komunikasi (seperti penerbit, stasiun televisi, atau studio film). Pesan dapat berbentuk tinta pada kertas, gelombang suara di udara, impuls dalam arus listrik, lambaian tangan, bendera di udara atau setiap tanda yang dapat ditafsirkan. Sasarannya mungkin seorang individu yang mendengarkan, menonton atau

membaca, atau anggota suatu kelompok seperti kelompok diskusi, kumpulan penonton sepak bola, atau khalayak media massa (Mulyana, 2005).

Pola komunikasi melingkar adalah jenis interaksi di mana informasi mengalir secara melingkar di antara para partisipan, bukan secara linier atau hierarkis. Pola komunikasi melingkar menekankan kolaborasi, konsensus, dan kesetaraan di antara para komunikator.

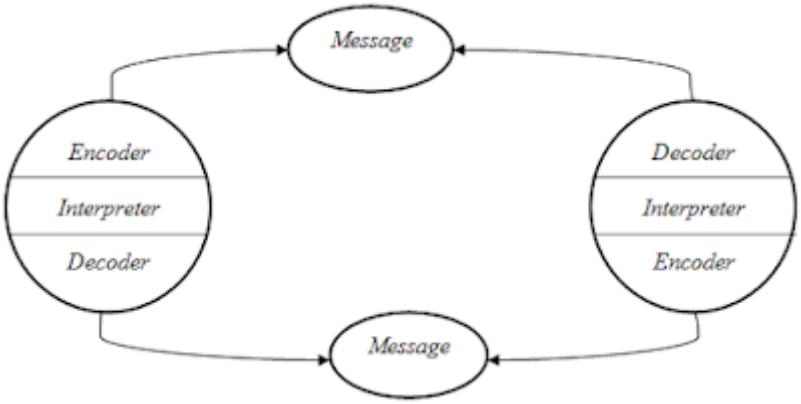

Gambar 2.2 Model Komunikasi oleh Osgood dan Schramm
Sumber: Pengantar Ilmu Komunikasi, Hafied Cangara

Gambar di atas menunjukkan model Komunikasi Sirkuler atau yang disebut Komunikasi Dua Arah merupakan lanjutan dari pendekatan komunikasi satu arah. Pada model komunikasi dua arah diperkenalkan gagasan tentang umpan balik (*feedback*). Dalam model ini, penerima (*receiver*) melakukan seleksi, interpretasi dan memberikan respon terhadap pesan dari pengirim (*sender*). Komunikasi dalam model ini dikatakan dua arah dimana setiap partisipan memiliki peran ganda, dalam arti pada suatu saat bertindak sebagai sender, namun pada suatu waktu yang lain berlaku sebagai *receiver* (Cangara H. , 2018).

Pola komunikasi sirkuler, juga dikenal sebagai model komunikasi transaksional, adalah konsep yang menggambarkan komunikasi sebagai proses saling berinteraksi antara dua atau lebih individu yang saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam pola komunikasi melingkar, pesan tidak hanya dikirim dari satu pihak ke pihak lain, tetapi juga kembali ke pihak asal sebagai tanggapan atau umpan balik. Dalam pola ini terdapat;

1. Pesan: Dalam pola komunikasi melingkar, pesan dikirim dari pengirim kepada penerima. Pesan dapat berupa kata-kata, bahasa tubuh, ekspresi wajah, atau simbol-simbol lainnya yang mengandung informasi atau makna yang ingin disampaikan.
2. Penerimaan: Penerima menerima pesan dari pengirim dan memprosesnya. Penerima dapat memahami, menafsirkan, atau merespons pesan sesuai dengan pemahaman dan persepsi mereka.
3. Umpan balik: Setelah menerima pesan, penerima memberikan umpan balik kepada pengirim. Umpan balik ini dapat berupa tanggapan lisan, ekspresi wajah, atau tindakan yang menunjukkan pemahaman atau reaksi terhadap pesan yang diterima.
4. Konteks: Pola komunikasi melingkar selalu terjadi dalam konteks tertentu. Konteks ini mencakup lingkungan fisik, situasi sosial, norma budaya, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi komunikasi antara pengirim dan penerima.
5. Interaksi: Pola komunikasi melingkar melibatkan interaksi aktif antara pengirim dan penerima. Komunikasi bukan hanya tentang pengiriman pesan, tetapi juga tentang saling mempengaruhi, saling memahami, dan saling beradaptasi dalam proses komunikasi.
6. Siklus: Pola komunikasi melingkar terjadi dalam siklus yang berulang. Setelah umpan balik diberikan, proses komunikasi dapat berlanjut dengan pengirim menjadi penerima dan penerima menjadi pengirim dalam komunikasi selanjutnya.

Kelebihan dari pola komunikasi melingkar adalah adanya kesempatan untuk saling beradaptasi dan memperbaiki komunikasi berdasarkan umpan balik yang diberikan. Pola ini juga memperkuat hubungan interpersonal dan memungkinkan komunikasi yang lebih efektif dan terbuka antara individu.

2.3.4. Komponen Komunikasi

Dalam mengkaji kegiatan komunikasi, kebanyakan ahli komunikasi menggunakan formula *"who, says what, in which channel, to whom, with what effect"* suatu paradigma komunikasi yang disusun Harold D. Lasswell. Pada

paradigma tersebut tampak jelas, bahwa komponen komunikasi yang memungkinkan terjadinya proses komunikasi adalah komunikator, pesan, media, dan komunikan, dengan efek sebagai tolok ukur berhasil tidaknya sebuah komunikasi.

2.3.4.1. Kredibilitas Komunikator

Dipandang dari dimensi komunikator, komunikator yang efektif adalah komunikator yang memiliki kredibilitas (*source credibility*) dan daya tarik. Kredibilitas ditentukan oleh derajat keahlian, pengalaman, keterampilan, kejujuran dan jabatan. Seorang komunikator memiliki daya pengaruh akan dihormati dan diikuti oleh massa komunikannya. Dalam kajian komunikasi, masalah daya pengaruh ini sangat penting karena daya pengaruh merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan komunikasi. (Shoelhi, 2014).

2.3.4.2. Opini Publik

Proses terjadinya opini publik didahului oleh perbincangan mengenai suatu gejala sosial, antara lain kebijakan atau keputusan yang bersifat kontroversial, yakni menimbulkan sikap pro dan kontra. Opini publik bisa bersifat mendukung dan bisa juga menentang suatu kebijakan atau keputusan. Marrian D. Irish dan James W. Prothro mendefinisikan opini publik sebagai *the expression of attitudes on a social issue*. Kenyataan dalam kehidupan politik menunjukkan, seorang pemimpin politik adalah orang yang memiliki kemampuan memobilisasi opini publik (Shoelhi, 2014, hal. 67).

2.3.4.3. Pesan Komunikasi

Sanders dan Kaid (1977) dalam karyanya *Political Communication, Theory and Research: An Overview*, mengatakan bahwa komunikasi politik harus *intentionally persuasive.* Itu berarti pesan-pesannya harus emngandung tujuan dan dikemas dengan baik dengan

pemilihan kata-kata yang tepat dan disampaikan secara persuasif sehingga komunikan bersedia memperhatikan dan memberikan tanggapan.

2.3.4.4. Saluran Komunikasi

Dalam menyampaikan pesan, para pelaku komunikasi menggunakan berbagai macam saluran. Saluran komunikasi yang dipilih adalah komunikasi tatap muka dalam bentuk pertemuan, baik formal maupun nonformal, dan saluran media massa cetak atau media elektronik. Memasuki abad ke-21 ini sekarang ini, umat manusia mengalami suatu masa yang oleh Alvin Toffler dinamakan ‘era informasi politik’, yang dalam dinamikanya terjadi proses saling pengaruh-mempengaruhi.dalam hubungan ini, politik komunikasi dan komunikasi politik dengan media massa semakin penting (Shoelhi, 2014, hal. 92).

2.3.4.5. Efek

Nimmo dalam bukunya *Political Communication and Public Opinion in America*, menekankan pada efek yang muncul pada komunikan sebagai akibat dari penyampaian suatu pesan. Menurut kadarnya, efek komunikasi terdiri dari tiga jenis, yakni efek kognitif, efek afektif, dan efek konatif. Onong Uchjana Efendy (1986) mengatakan bahwa sebuah pesan yabg menimbulkan efek kognitif pada komunikan membuat komunikan mengerti pesan yang disampaikan komunikator sehingga menjadi informasi atau pengetahuan baginya. Apabila pesan tadi menyentuh lubuk hatinya, maka akan menimbulkan efek afektif ketika tergugah perasaan tertentu padanya. Kemudian, yang lebih tinggi kadarnya, dari kedua jenis efek tersebut adalah efek konatif, karena pesan komunikasi tadi tidak saja berhasil membuat komunikan mengerti disertai perasaan tertentu, tetapi juga membuat ia melakukan suatu tindakan.

2.3.5. Gender dan Politik

Konsep gender dan politik menyoroti peran dan pengaruh gender dalam konteks politik. Ini melibatkan analisis tentang bagaimana konstruksi sosial dari gender mempengaruhi pembagian kekuasaan, partisipasi politik, kebijakan publik,

dan dinamika politik secara keseluruhan. Secara umum, gender diistilahkan sebagai proses kompleks yang melibatkan konstruksi sosial identitas laki-laki dan perempuan dalam hubungannya satu sama lain. Namun, gender juga kerap dimaknai mengenai ‘peran’, misalnya pada materi tentang demokrasi dan keterwakilan, dimana gender difokuskan terhadap peran perempuan dalam politik (Goertz & Mazur, 2008).

Gender dan politik berkaitan dengan bagaimana posisi gender di masyarakat dalam partisipasi dan pengalaman dalam peristiwa-peristiwa politik. Secara historis dan lintas negara, gender telah menjadi faktor penentu utama dalam pendistribusian sumber daya, bagaimana kebijakan ditetapkan, dan siapa yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Para peneliti gender dan politik mempelajari bagaimana partisipasi dan pengalaman politik masyarakat berinteraksi dengan identitas gender mereka, dan bagaimana gagasan gender membentuk institusi politik dan pengambilan keputusan. Partisipasi politik perempuan dalam konteks sistem politik patriarki menjadi fokus kajian khusus.

Secara umum, perempuan diberikan hak untuk memilih dan menjadi kandidat lebih lambat dibandingkan laki-laki. Hal ini untuk waktu yang lama mengecualikan mereka dari partisipasi formal dan deskriptif. Meskipun ada klaim bahwa perempuan berpartisipasi melalui suara ayahnya dan kemudian suaminya dan parlemen yang secara eksklusif laki-laki mewakili mereka secara simbolis tidak adanya hak untuk memilih menyiratkan bahwa para wakil rakyat tidak bertanggung jawab secara langsung perempuan (Goertz & Mazur, 2008). Saat ini, perempuan di sebagian besar negara mempunyai hak yang sepenuhnya. Meskipun demikian, di sebagian besar negara bagian, perempuan masih mengalami hal tersebut kurang terwakili pada tingkat formal dan deskriptif, misalnya dalam daftar kandidat dan dalam majelis. Untuk mengatasi kurangnya keterwakilan lembaga-lembaga politik, undang-undang kesetaraan dan kuota telah diterapkan di lebih banyak negara untuk mendobrak hambatan yang menghambat partisipasi formal dan deskriptif perempuan (Goertz & Mazur, 2008, hal. 76).

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Paradigma menurut (Kuhn, 1962), menunjukkan kerangka konseptual yang dipergunakan bersama komunitas ilmuwan yang menyediakan model yang tepat untuk mengkaji masalah dan menemukan solusinya. Kuhn merumuskan paradigma sebagai kumpulan terpadu konsep-konsep substantif, variabel, dan masalah yang berhubungan dengan pendekatan metodologis serta perangkat-perangkatnya (Kuhn, 1962). Bagi Kuhn, paradigma merupakan budaya penelitian yang memiliki sekumpulan keyakinan, nilai-nilai, dan asumsi yang sama oleh komunitas peneliti yang digunakan dalam melihat serta menjalankan penelitian. Paradigma memegang peran penting dalam menentukan sudut pandang dan pendekatan terhadap permasalahan dalam ilmu sosial. Dalam hal ini, paradigma membantu peneliti menemukan perspektif yang tepat serta memilih teori dan metode yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Dalam konteks ini, paradigma konstruktivis menjadi pendekatan yang diterapkan dalam penelitian peneliti.

Konstruktivisme adalah paradigma filosofis yang secara ontologis menekankan bagaimana seorang individu secara aktif mengkonstruksi gagasannya sendiri tentang realitas melalui kognisinya (Lincoln & Guba, 1985) menghasilkan adanya berbagai realitas. Seorang peneliti yang percaya pada paradigma ini menekankan konstruksi, deskripsi, dan narasi pengalaman hidup partisipan sendiri serta keyakinan bahwa pengetahuan dibangun bersama antara peneliti dan partisipan (Tashakkori, Johnson, & Teddlie, 2021). Para peneliti ini juga menyadari bahwa mereka tidak dapat dipisahkan dari proses penelitian dan justru melihat hal ini sebagai pengaruh positif terhadap penelitian (Lincoln & Guba, 1985). Secara metodologis, konstruktivisme sering dikaitkan dengan penelitian

kualitatif. Peneliti konstruktivis menekankan metode penelitian induktif (Tashakkori, Johnson, & Teddlie, 2021).

Dalam mendiskusikan konstruktivisme, Crotty (1998) dalam buku creswell mengidentifikasi beberapa asumsi (Creswell, 2009, hal. 8-9):

1. Makna dibangun oleh manusia saat mereka berinteraksi dengan dunia yang mereka interpretasikan. Peneliti kualitatif cenderung menggunakan pertanyaan terbuka agar partisipan dapat berbagi pandangan mereka.
2. Manusia berinteraksi dengan dunia mereka dan memberikan makna padanya berdasarkan perspektif historis dan sosial mereka - kita semua dilahirkan ke dalam dunia makna yang diberikan kepada kita oleh budaya kita. Oleh karena itu, peneliti kualitatif berusaha memahami konteks atau setting partisipan melalui kunjungan ke konteks ini dan pengumpulan informasi secara pribadi. Mereka juga menafsirkan apa yang mereka temukan, sebuah interpretasi yang dibentuk oleh pengalaman dan latar belakang peneliti.
3. Generasi makna dasar selalu bersifat sosial, muncul dari interaksi dengan komunitas manusia. Proses penelitian kualitatif sebagian besar bersifat induktif, dengan peneliti menghasilkan makna dari data yang dikumpulkan di lapangan.

3.2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian fenomenologi. Penelitian fenomenologis merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang berupaya memahami dan mendeskripsikan esensi universal suatu fenomena. Pendekatan ini menyelidiki pengalaman sehari-hari manusia sambil menangguhkan asumsi-asumsi yang telah terbentuk sebelumnya dari para peneliti tentang fenomena tersebut. Dengan kata lain, penelitian fenomenologis mempelajari pengalaman hidup untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana orang memahami pengalaman tersebut (Groenewald, 2004). Dalam penelitian yang akan dilakukan terdapat 2 metode; (1) mengeksplorasi pengalaman subjek kepemimpinan perempuan; (2) menguraikan makna atau hasil pemahaman peneliti terhadap pengalaman.

Peneliti yang menggunakan desain penelitian fenomenologis berasumsi bahwa orang menggunakan struktur atau esensi universal untuk memahami pengalaman mereka. Mereka menafsirkan perasaan, persepsi, dan keyakinan partisipan untuk memperjelas esensi fenomena yang diselidiki. Desain penelitian fenomenologis mengharuskan peneliti untuk mengelompokkan asumsi apriori apa pun yang mereka miliki tentang pengalaman atau fenomena. Dalam istilah yang lebih sederhana, peneliti menggunakan desain penelitian fenomenologis untuk memahami sifat universal suatu fenomena dengan mengeksplorasi pandangan orang-orang yang pernah mengalaminya. Pendekatan ini populer digunakan untuk mempelajari pengalaman hidup, mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang cara berpikir manusia, dan memperluas pengetahuan peneliti tentang suatu fenomena (Groenewald, 2004).

Seperti yang dinyatakan oleh Giorgi (1985), Van Manen (1990), Moutakas (1994), dan ahli fenomenologis lainnya, mewawancarai individu yang mengalami fenomena tertentu adalah sumber dasar yang diandalkan oleh penyelidikan fenomenologis untuk memahami fenomena tersebut. Pendekatan kualitatif fenomenologis yang disarankan menawarkan strategi yang 'mempertajam tingkat praktik yang sedang berlangsung dalam penelitian kualitatif yang diilhami secara fenomenologis' (Giorgi, 2006, hal. 306). Metode dan kegiatan pengumpulan data bersifat fleksibel, dan analisisnya dirancang agar selaras dengan asumsi teoritis dan filosofis yang mendasari penelitian kualitatif. Strategi ini memungkinkan peneliti untuk berdialog dengan partisipan dan data untuk menghasilkan deskripsi pengalaman yang berlapis-lapis.

3.3. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam riset ini subjek penelitian adalah "pemimpin perempuan negara-negara ASEAN, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand". Pemimpin perempuan ASEAN merujuk kepada para perempuan yang memegang jabatan kepemimpinan di negara-negara anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Subjek penelitian ini mencakup pemimpin perempuan yang terlibat dalam kegiatan politik di negara-negara ini. Penelitian ini akan melibatkan pemimpin perempuan dari empat negara tersebut sebagai responden

dalam wawancara. Dimana dalam hal ini, terdapat 5 informan, informan dipilih sesuai dengan karakteristik latar belakang politik, yang memiliki perhatian terhadap perempuan, gender, dan HAM. Objek penelitian pada riset ini adalah *Nonviolent Communication* yang digunakan pemimpin perempuan ASEAN untuk mengaktualisasikan aspirasi masyarakat.

Subjek/Informan Penelitian

1. Ledia Hanifa Amaliah selaku Anggota Komisi X DPR RI
2. Nihayatul Wafiroh selaku Anggota Komisi IX DPR RI
3. Pilar Juliana Schramm Cayetano, selaku Anggota Parlemen Filipina
4. Chitpas Kridakorn, selaku Anggota Parlemen Thailand
5. Siti Mastura, selaku Anggota Parlemen Malaysia

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Langkah-langkah pengumpulan data yang penulis lakukan adalah mencakup menetapkan batasan studi, mengumpulkan informasi melalui dokumen dan publikasi, serta wawancara intensif. Dimana peneliti mengidentifikasi situs/sumber atau individu yang dipilih dengan sengaja untuk topik yang diusulkan. Ide di balik penelitian kualitatif adalah memilih peserta atau situs (atau dokumen atau materi visual) yang akan membantu peneliti memahami masalah dan pertanyaan penelitian (Creswell, 2009).

Disini peneliti mengumpulkan sumber data seperti, literatur akademik, jurnal, buku, dokumen-dokumen resmi, dan publikasi lain yang berkaitan dengan pola komunikasi politik pemimpin perempuan ASEAN. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara. Dimana, wawancara akan penulis lakukan dengan pemimpin perempuan ASEAN, yang memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang pola komunikasi politik pemimpin perempuan ASEAN. Wawancara akan memberikan wawasan langsung tentang pengalaman, sikap, dan persepsi pemimpin perempuan ASEAN dalam menyampaikan aspirasi publik, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pola komunikasi politik mereka.

3.5. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, untuk menjaga keabsahan data atau validitas data, maka dilakukan dengan triangulasi. Pada (Creswell, 2009, hal. 191), mengatakan bahwa keabsahan merupakan salah satu kekuatan penelitian kualitatif, dan hal ini didasarkan pada penentuan apakah temuan tersebut akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca. Creswell menyarankan strategi yang dapat digunakan untuk menilai keakuratan temuan yaitu; triangulasi.

Melakukan triangulasi berbagai sumber data dan informasi dengan memeriksa bukti dari sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi yang koheren terhadap tema. Jika tema ditetapkan berdasarkan pemusatan beberapa sumber data atau perspektif partisipan, maka proses ini dapat diklaim menambah validitas penelitian (Creswell, 2009). Peneliti mengumpulkan data sebanyak-banyaknya untuk memahami lebih dalam tentang masalah penelitian. Di tahap ini peneliti menggunakan triangulasi untuk memperoleh data lebih banyak lagi dan menjamin bahwa data itu kredibel dari hasil-hasil triangulasinya. Triangulasi dapat dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari studi pustaka dan wawancara. Dengan memadukan data dari berbagai sumber, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang pola komunikasi pemimpin politik perempuan ASEAN dalam menyampaikan aspirasi publik.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang sesuai dengan tipe penelitian ini adalah teknik Miles dan Huberman, yang terdiri dari (1) *data condensation*, (2) *data display*, dan (3) *conclusion drawing/verification*.

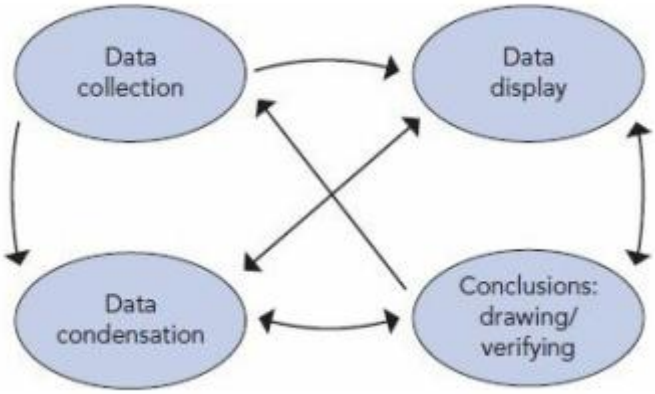

Gambar 3.3 Komponen Analisis Data: Model Interaktif
Sumber: Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.)

Data Condensation mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data, yang muncul dari korpus catatan transkrip wawancara, dokumen, dan materi empiris lainnya. Dimana, dengan melakukan kondensasi akan membuat data menjadi lebih kuat (Milles, Huberman, & Saldana, 2014). Melalui kondensasi data, tidak selalu berarti kuantifikasi. Data kualitatif dapat diubah dalam banyak cara: melalui seleksi, melalui ringkasan dan parafrase, dan sebagainya. Kemudian, Aliran utama aktivitas analisis yang kedua adalah *data display*. Secara umum, *data display* adalah kumpulan informasi yang terorganisir dan terkompresi yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan tindakan. Dimana, tujuan dari data display adalah membantu peneliti untuk memahami apa yang terjadi, dan melakukan sesuatu untuk menganalisis lebih lanjut atau mengambil tindakan berdasarkan pemahaman (Milles, Huberman, & Saldana, 2014, hal. 31). Kemudian, teknik analisis data ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Sejak awal pengumpulan data, analis kualitatif menafsirkan apa yang dimaksud dengan mencatat pola, penjelasan, alur sebab akibat, dan proposisi. Pengkodean data, misalnya (kondensasi data), memunculkan ide-ide baru tentang apa yang harus dimasukkan ke dalam matriks (tampilan data). Memasukkan data memerlukan kondensasi data lebih lanjut. Saat matriks terisi, kesimpulan awal diambil, tetapi kesimpulan tersebut mengarah pada keputusan, misalnya, untuk

menambahkan kolom lain ke matriks untuk menguji kesimpulan (Milles, Huberman, & Saldana, 2014, hal. 32).

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dalam studi ini, pola komunikasi politik parlemen perempuan Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi publik yang peneliti teliti menggunakan pendekatan *Nonviolent Communication* (NVC) dan Teori Retorika Persuasif menghasilkan temuan yang unik. Peneliti meminjam komponen *Observations, Feelings, Needs* dan *requests* dari (Rosenberg, 2015) yang peneliti maknai dengan *compassionate communication.* Komponen tersebut peneliti maknai dengan (1) Mendengarkan secara aktif aspirasi dari publik; (2) Menyatakan empati secara jelas; (3) Menghormati perasaan dan kebutuhan masyarakat; (4) Menyampaikan pesan dengan kelembutan dan penuh pengertian; (5) Mencari solusi bersama yang memenuhi kebutuhan semua pihak; (6) Menghindari sikap menyalahkan atau menghakimi.

Komponen tersebut digunakan pemimpin perempuan dalam "menyerap aspirasi/pesan" yang disampaikan oleh masyarakat. Komponen tersebut lah yang membantu pemimpin perempuan dalam memaknai dan memahami dengan jelas, tentang kebutuhan yang disampaikan oleh masyarakat. Pada penyaluran aspirasi, pemimpin perempuan harus dapat menggunakan gaya komunikasi yang persuasif, agar dapat memperjuangkan RUU. Gaya komunikasi tersebut, dibekali dengan Karakter/kredibilitas, penekanan pada emosi, dan bagaimana berpikir secara rasional yang didasarkan pada fakta. Meminjam teori dari Retorika Persuasif (Aristotle, 1959), pemimpin perempuan yang memperjuangkan aspirasi rakyat untuk diwujudkan menjadi kebijakan di ruang parlemen dapat memanfaatkan kredibilitas atau karakter mereka untuk memperkuat kepercayaan ketua dewan terhadap integritas dan kepemimpinan mereka. Selain itu, pemimpin perempuan

dalam ruang parlemen menggunakan pendekatan yang menekankan pada emosi, seperti menggugah rasa empati dan kebutuhan ketua dewan, dengan menyajikan berbagai keluhan dan permintaan oleh masyarakat.

Setelah dibentuknya kebijakan tersebut, maka efek yang dihasilkan akan memiliki 6 tujuan yang ditemui oleh peneliti, berupa, Integritas/keselarasan, Sinergi, Konsensus, Interpretasi, Hak Asasi, dan inklusif.

1. Integritas/keselarasan: Tujuan pertama adalah memastikan bahwa kebijakan yang dibentuk mencerminkan kejujuran, konsistensi, dan kesesuaian dengan nilai-nilai yang dianut. Integritas ini mencakup aspek-aspek seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses pembentukan dan pelaksanaan kebijakan. Pemimpin perempuan yang memimpin proses pembentukan kebijakan dengan kejujuran, konsistensi, dan keadilan akan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan integritas. Mereka dapat memperjuangkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat didahulukan di atas kepentingan pribadi atau politik.
2. Sinergi: Tujuan kedua adalah menciptakan kerjasama dan kolaborasi yang erat antara berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Sinergi ini memungkinkan untuk memanfaatkan sumber daya dan upaya secara efisien, serta memaksimalkan dampak positif dari kebijakan tersebut. Pemimpin perempuan mampu membangun sinergi antara berbagai pihak dengan mendengarkan dan mengintegrasikan berbagai pandangan dan kepentingan. Mereka memfasilitasi kerjasama dan kolaborasi yang erat antara pemangku kepentingan yang beragam untuk mencapai tujuan bersama.
3. Konsensus: Tujuan ketiga adalah mencapai kesepakatan bersama atau persetujuan luas dari berbagai pemangku kepentingan terkait dengan kebijakan yang dibentuk. Konsensus ini mencerminkan adanya dukungan yang kuat dari berbagai pihak, sehingga memperkuat legitimasi dan stabilitas kebijakan. Pemimpin perempuan memainkan peran penting dalam memperoleh konsensus dari berbagai pihak terkait dengan

kebijakan yang diusulkan. Mereka berusaha untuk mencapai kesepakatan bersama dengan mendengarkan, memfasilitasi dialog, dan mencari kompromi yang dapat diterima oleh semua pihak.

4. Interpretasi: Tujuan keempat adalah memastikan bahwa kebijakan yang dibentuk dapat diinterpretasikan dengan jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Interpretasi yang jelas meminimalisir kemungkinan kesalahpahaman atau konflik terkait dengan implementasi kebijakan. Pemimpin perempuan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat dapat diinterpretasikan dengan jelas oleh semua pihak yang terlibat. Mereka menggunakan komunikasi yang efektif untuk menjelaskan tujuan, dampak, dan implikasi dari kebijakan kepada masyarakat.
5. Hak Asasi: Tujuan kelima adalah melindungi dan memperkuat hak-hak asasi manusia dalam konteks pelaksanaan kebijakan. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu. Pemimpin perempuan memperjuangkan perlindungan dan penguatan hak asasi manusia dalam setiap aspek kebijakan yang dibuat. Mereka memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan menghormati dan melindungi hak-hak individu dan kelompok yang rentan dalam masyarakat.
6. Inklusif: Tujuan terakhir adalah memastikan bahwa kebijakan yang dibentuk inklusif, artinya memperhitungkan beragam pandangan, kebutuhan, dan aspirasi dari seluruh masyarakat. Kebijakan yang inklusif memastikan bahwa berbagai kelompok dan individu, termasuk yang mungkin terpinggirkan atau kurang terwakili, turut serta dalam proses pembentukan kebijakan dan mendapatkan manfaat dari implementasinya. Pemimpin perempuan memperjuangkan kebijakan yang inklusif dengan memastikan partisipasi dan representasi dari berbagai kelompok dan individu dalam proses pembuatan kebijakan. Mereka mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa suara dan kepentingan semua pihak, termasuk yang terpinggirkan, didengar dan diakomodasi dalam kebijakan yang dihasilkan.

Namun, terdapat perbedaan di keempat negara yang peneliti analisis dalam menghasilkan kebijakan. Seperti, Parlemen perempuan Indonesia dan Filipina, memiliki irisan kecenderungan yang sama, yang memiliki ke enam indikator temuan peneliti. Berbeda hasil dengan perlemen perempuan Malaysia dan Thailand, yang memiliki kecenderungan terhadap kurang memenuhi indikator 'Keselarasan'. Kondisi ini sebagian besar disebabkan oleh regulasi politik yang ada dan hambatan budaya yang mendasari sistem politik mereka. Faktor-faktor lingkungan dan dinamika politik sangat memengaruhi bagaimana anggota parlemen membuat keputusan, tekanan politik dari pihak-pihak dengan kepentingan sendiri dapat menghambat keselarasan mereka dalam memprioritaskan kebijakan.

5.2. Saran

a) Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, beberapa saran yang dapat diajukan:
    1. Parlemen perempuan ASEAN dapat memanfaatkan media sosial sebagai saluran komunikasi untuk berinteraksi dengan masyarakat secara langsung, membagikan informasi, dan merespons pertanyaan atau masukan dari masyarakat;
    2. parlemen perempuan ASEAN perlu menjadi teladan dalam perilaku dan komunikasi, sehingga dapat membangun kepercayaan dan kredibilitas di mata masyarakat;
    3. parlemen perempuan ASEAN dapat memberikan pandangan dan perspektif kepada masyarakat, bahwa perempuan juga dapat menjadi pemimpin dan bersaing di kancah global;
    4. parlemen perempuan ASEAN dapat memberikan pendidikan dan advokasi kepada masyarakat, terkait isu-isu masyarakat yang penting, seperti hak perempuan, pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender, untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang isu-isu tersebut.

b) Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, mengingat jangka waktu yang sedikit dan aksesibilitas kepada anggota parlemen yang cukup sulit. Sehingga, untuk penelitian selanjutnya, disarankan;
    1. dapat lebih dalam menganalisis pola komunikasi yang dilakukan oleh parlemen perempuan ASEAN kepada publik;
    2. dapat memberikan alasan mengapa beberapa negara otokratis memiliki lebih banyak keterwakilan perempuan dibandingkan dengan negara demokrasi;
    3. dapat menganalisis mengapa sebagian perempuan ragu dalam mendukung perempuan lain untuk mengejar kepemimpinan politik dan bagaimana dala meningkatkan kesadaran pemilih perempuan terhadap kandidat perempuan yang memiliki peluang lebih tinggi untuk mendukung kebijakan mengenai isu-isu perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Adams, S. M., A. Gupta, & Leeth., J. D. (2009). Are Female Executives Over-Represented in Precarious Leadership Positions? *British Journal of Management 20 (1): https://doi.org/10.1111/j.1467-8551.2007.00549.x.*, 1–12.

Adawiyah, l. S., Hubeis, A., Sumarti, T., & Susanto, D. (2019). Strategi Komunikasi Politik Perempuan Dalam Meraih Kepemimpinan Daerah. *Journal Of Communication Studies; MetaCommunication. Vol 4 No 1 Maret 2019*, 95-113.

Ariffin, J. (1992). *Women and development in Malaysia.* Pelanduk Publications.

Aristotle. (1954). *On rhetoric (trans. W. Rhys Roberts).* London: Random House.

Aristotle. (1959). *Rhetoric. Edited by Ross, W.D.* Oxford: Oxford UP.

ASEAN. (2021). *Projected gender impact of the ASEAN Economic Community.* ASEAN.org.

ASEAN. (2023). *About ASEAN*. Retrieved February 9, 2024, from https://asean.org/about-asean/

ASEAN Secretariat. (2021). *ASEAN Gender Outlook : Achieving the SDGs for all and leaving no woman or girl behind.* Bangkok, Thailand: UN Women.

ASEAN Secretariat. (2024). *ASEAN Member States.* Jakarta: asean.org.

ASEAN, A. o. (2016). *ASEAN Women unite to promote women's leadership'.* Singapore: ASEAN.org.

Ashaf, A. F. (2006). Pola Relasi Media, Negara, dan Masyarakat: Teori Strukturasi Anthony Giddens Sebagai Alternatif. *Sosiohumaniora, Vol. 8, No. 2, Juli 2006* , 205-218.

Aspinal, E. (2021). Women's Political Representation in Indonesia: Who Wins and How? *Journal of Current Southeast Asian Affairs, Vol 40. DOI: 10.1177/1868103421989720*, 3-27.

Aspinall, E., Weiss, M., & Hicken, A. a. (2022). *Mobilizing for Elections: Patronage and Political Machines in Southeast Asia.* United Kingdom: Cambridge University Press.

Aspinall, E., White, S., & Savirani, A. (2021). Women's political representation in Indonesia: Who wins and how"? *Journal of Current Southeast Asian Affairs, 40 (1),* 3-27.

Badan Pusat Statistik. (2015). *Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menurut jenis kelamin, 1995-2014*. Retrieved February 11, 2024, from https://www. bps. go. id/ statictable/ 2014/ 09/ 12/ 1172/ anggota-dewanperwakilan-rakyat-dpr-menurut-jenis-kelain-1955-2014.html

Bass, B. M. (1985). *Leadership and Performance Beyond Expectations.* . New York: Free Press.

Batson, C. S. (1996). I've Been There, Too: Effect on Empathy of Prior Experience with a Need. *Personality and Social Psychology Bulletin 22 (5): https://doi.org/10.1177/0146167296225005.*, 474-482.

BBC. (2017, August 23). *Profile: Yingluck Shinawatra*. Retrieved January 26, 2024, from https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-13723451

Beaman, & Lori. (2012). *Female Leadership Raises aspirations and educational Attainment for Girls: A Policy Experiment in India.* Retrieved January 21, 2024, from https://www.science.org/

Bessell, S. (2004, February 2). Women in Parliament in Indonesia: denied a share of power. *Discussion paper, Asia Pacific school of economics and government*, p. Australian National University.

Braun, V. &. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology, 3(2),*, 77-101.

Bui, K. H. (2010). *Women in Parliament: A Case of Vietnam.* Munich: GRIN.

Bungin, B. (2020). *Post Qualitative Social Reserach Methods: Kuantitaif-Kualitatif-Mixed Methods (Edisi Ketiga).* Jakarta: Kencana.

Buranajaroenkij, D. (2017). *Political Feminism and the Women's Movement in Thailand: Actors, Debates and Strategies.* Bangkok: FES Thailand Office.

Burke, K. (1969). *A Rhetoric of motives.* . Berkley, CA: University of California Press.

Butler, J. (1993). *Bodies that matter. On the discursive limits of sex.* . New York & London: Routledge.

Caballero, J. a. (2008). *Mujeres contra el Estado terj.* Castellón: Seminari d'Investigació Feminista.

Caesar, M. A., & Nailufar, N. N. (2022, February 17). *Budaya Politik di Indonesia*. Retrieved November 02, 2023, from Kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2022/02/17/00300031/budaya-politik-di-indonesia

Cangara, H. (2009). *Komunikasi politik: konsep, teori, dan strategi.* Rajawali Pers.

Cangara, H. (2018). *Pengantar Ilmu Komunikasi.* Depok: Rajawali Pers.

Carli, L. a. (2011). *Gender and leadership.* London: Sage Publications.

Carroll, S. J. (2001). *Representing Women. Women State Legislators as Agents of Policy-Related Change.* Bloomington: Indianapolis.

Center for Integrative and Developments Studies. (2023). *Barriers to Filipino Women's Political Participation.* Quezon: UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES, Center for Integrative and Development Studies.

Chatuthong, A., & Ponglopitsit, S. (2012). *Laws that Bar Women from Equal Rights.* Bangkok: Foundation for Women.

Chesterman, C., & Ross-Smith, A. (2004). *Senior Women Executives and Cultures of Management*. Retrieved October 27, 2023, from t http://www.uts.edu.au/oth/wexdev/research/outomes.html

Chitpas. (2024, January 13). *Instagram*. Retrieved January 31, 2024, from https://www.instagram.com/p/C2BguB8pMxl/

Cho, Y. K. (2017). *Korean Women in Leadership: Challenges and Opportunities. In Y. Cho, R. Ghosh, J. Y. Sun, & G. N. Mclean (Eds.), Current Perspectives on Asian Women in Leadership: A Cross-cultural Analysis.* Switzerland: Springer.

Cho, Y., Ghosh, R., Sun, J. Y., & Mclean, G. (2017). *Current Perspectives on Asian Women in Leadership: A Cross-Cultural Analysis. .* Switzerland: Springer.

Choi, N. (2018). Women's political pathways in Southeast Asia. *Routledge Taylor and Francis. International Feminist Journal of Politics*, 1-25.

Chu, W. M. (1994). Religion and culture: Prohibitive factors for women's participation in politics. *Asian Institute for Development (AIDOM).*, 53-60.

Clisbee, M. (2005). Gender differences in leadership style: A literature analysis. *Journal of Women in Educational Leadership, 3(1)*, 38-54.

Coon, D. (1994). *Essentials of Psychology, 6th ed.* Los Angeles: West Publishing.

Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches 3rd Edition.* California: Sage Publication.

Dahlerup, D. (2018). Gender equality as a closed case: A survey among the members of the 2015 Danish parliamen. *Scandinavian Political Studies, 41(2)*, 188-209.

Dahlerup, D., & Leyenaar, M. (2013). *Breaking male dominance in old democracies.* Oxford University Press.

Deth, J. W. (2021). What Is Political Participation? *Oxford Research Encyclopedias, Politics.*, 1-17.

Duflo, E. (2012). Women's empowerment and economic development. *Journal of Economic Literature, vol. 50, No. 4*, pp. 1051–1079.

Eagly, A. H. (1990). Gender and Leadership Style: A Meta-Analysis. *Psychological Bulletin 108 (2), doi.org/10.1037/0033-2909.108.2.233.*, 233-256.

Eagly, A., & Johnson, B. (1990). Gender and leadership style: a meta-analysis. *Psychological Bulletin, 108, 22*, 233-256.

Frymier, A. B. (2007). *Persuasion: Integrating theory, research, and practice.* Kendall/Hunt.

Gagich, M. (2017). *Introduction to Writing in College.* Cleveland: MSL ACADEMIC ENDEAVORS.

Groenewald, T. (2004). A Phenomenological Research Design Illustrated. *International Journal of Qualitative Methods*, 42-55.

Haerpfer, C. I. (2022). *"World Values Survey: Round Seven - Country-Pooled Datafile Version 4.0"*. Austria: JD Systems Institute & WVSA Secretariat.

Hamzah, S. R. (2017). *Women in leadership in Malaysia. Current Perspectives on Asian Women in Leadership* . Switzerland: Palgrave Macmillan.

Hega, M. D., Alporha, V. C., & Evangelista, M. S. (2017). *Feminism and the Women's Movement in the Philippines: Struggles, Advances, and Challenges.* Manila: FES Manila Office.

Hillman, B. (2017). Increasing women's parliamentary representation in Asia and the Pacific: the Indonesian experience. *Asia & the Pacific Policy Studies 4(1)*, 38-49.

Hobbins, J. E. (2022). Women, Leadership, and Change – Navigating between Contradictory Cultures. *NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 31:3, DOI: 10.1080/08038740.2022.2098377*, 209-221.

Hülsheger, U. R. (2013). Benefits of Mindfulness at Work: The Role of Mindfulness in Emotion Regulation, Emotional Exhaustion, and Job Satisfaction. *Journal of Applied Psychology 98 (2): https://doi.org/10.1037/a0031313.*, 310-325.

International IDEA. (2017). *Regional Organizations, Gender Equality and the Political Empowerment of Women.* New York.

Inter-Parliamentary Union. (2022). *About Us*. Retrieved January 16, 2024, from https://www.ipu.org/about-us

Inter-Parliamentary Union. (2023). *Women in Parliament in 2022*. Geneva: IPU.

IPU Parline. (2023). *IPU Parline Global Data on National Parlement*. Retrieved February 07, 2024, from Indonesa - House of Representatives: https://data.ipu.org/parliament/id?chamber_id=13420

Izharuddin, A. (2019). *The 30% hope: Securing the electoral success of women in Malaysia baharu.* New Mandala.

Jablin, F. M., R. L. Cude, A. H., & Roth., N. L. (1994). *Communication Competence in Organizations: Conceptualizations and Comparison across Multiple Levels of Analysis.* Norwood: Ablex.

Kelly, S. (2010). *Qualitative interviewing techniques and styles. The Sage Handbook of Qualitative Methods in Health Research.* Thousand Oaks: Sage Publications.

Kemlu.go.id. (2020). *Hubungan Bilateral Indonesia & Thailand.* Bangkok: Kedutaan Besar Republik Indonesia Bangkok.

Kenski, K., & Jamieson, K. H. (2017). *The Oxford Handbook of Political Communication.* New York: Oxford University Press.

Kim, H. (2013). Glass fence thicker than glass ceiling: The puzzling gaps of women's leadership in Korea. In J. Rajasekar (Ed.). *Culture and gender in leadership: Perspectives from the Middle East and Asia [https://doi.org/10.1057/9781137311573_13]*, 253-274.

Kim, H. (2013). *Glass fence thicker than glass ceiling: The puzzling gaps of women's leadership in Korea. In J. Rajasekar (Ed.), Culture and gender in leadership: Perspectives from the Middle East and Asia.* United Kingdom: Palgrave Macmillan.

King Prajadhipok Institute. (2022). *Women and politics: reality, political space and driving.* Dhamdamadapla Printing: Nonthaburi.

Koenig A. M., Eagly A. H., & Mitchell A. A., &. R. (2011). Are leader stereotypes masculine? A meta-analysis of three research paradigms. . *Psychology Bulletin, 137(4)*, 616-642.

Koldunova, E. &. (2017). Political Systems and Political Culture of the Southeast Asian States. In *Is Non-Western Democracy Possible?* (pp. 417-462). World Scientific.

Konrad Adenauer Stiftung. (2023). *Challenges for Women in Political Parties in Malaysia and Acceleration Strategies to Leadership in Politics.* Petaling Jaya, Malaysia: Konrad-Adenauer-Stiftung Malaysia Office.

Korabik K; Baril GL; Watson C. (1993). ‘Managers’ conflict management style and leadership effectiveness: the moderating effects of gender. *Sex Roles 29, https://doi.org/10.1007/BF00289432*, 405-420.

KPU RI. (2022). *KPU RI Menjadi Pemantau Internasional Pemilu Filipina*. Retrieved November 2, 2023, from Siaran Pers: https://www.kpu.go.id/dmdocument/1652172361Rilis%2010.05.2022%20Pak%20Idham%20ke%20Pemilu%20Filipina.pdf

Kuhn, T. S. (1962). *The Structure of Scientific Revolution.* Leiden: Instituut Voor Theoretische Biologie.

Kulich, C., V. Iacoviello, & Lorenzi-Cioldi., F. (2018). Solving the Crisis: When Agency Is the Preferred Leadership for Implementing Change. *The Leadership Quarterly 29 (2): https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2017.05.003.*, 259-308.

Labani, S., Kaehler, C. Z., & Ruiz, P. D. (2009). *Gender Analysis of Women's Political Participation in 7 South-East Asian Countries: Bangladesh, Cambodia, the Philippines, Indonesia, Sri Lanka, East Timor and Vietnam 2008-2009 : Regional Gender Programme in South-East Asia - Stage II.* Association for women's rights in development (AWID).

Labonne, J. S. (2019). *“Political Dynasties, Term Limits and Female Political Empowerment: Evidence from the Philippines.”.* NBER Working Papers 26431. National Breauty of Economic Research, Inc. .

Lagarde, M. (2000). *Claves feministas para la autoestima de las mujeres.* Madrid: Editorial Horas y Horas. .

Lee, D. S. (2018). Democratization and women’s representation in presidential cabinets: Evidence from East and Southeast Asia. *Asian Journal of Political Science, 26(2),* 161-180.

Lincoln, Y., & Guba, E. (1985). *Naturalistic inquiry.* Newbury Park, CA: Sage.

Lucas, R. E. (2007). *Personality and the Pursuit of Happiness.* London: Social and Personality Psychology Compass.

Lukes, S. (2005). *Power: A Radical View.* MacMillan: Palgrave.

Lutske, J. a. (2009). *“The Rhetorical Triangle: Understanding and Using Logos, Ethos, and Pathos.* Indiana University School of Liberal Arts.

Maguire, S. (2018). *Barriers to women entering parliament and local government.* United Kingdom: Institute for Policy Research Report. University of Bath.

Marshall, A. R. (2013, December 13). *"High society hits the streets as prominent Thais join protests"*. Retrieved January 26, 2024, from Reuters: https://www.reuters.com/article/amp/idUKBRE9BC0ZI20131213/?irpc=932&__twitter_impression=true

McNair, B. (1995). *An Introduction To Political Communication.* New York: Routledge.

Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1994). *Qualitative data analysis: A sourcebook of new Methods.* Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Moose, J. (2007). *Gender & pembangunan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Moustakas, C. (1994). *Phenomerwlogical research methods.* . Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Mukarom, Z. (2020). *Teori-teori komunikasi.* . Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Mulyana, D. (2005). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar.* Bandung : Remaja Rosdakarya.

Nimmo, D. D. (1981). *Handbook of Political Communication.* Beverly Hills: Sage Publications.

Norris, P. (2006). The Impact of Electoral Reform on Women's Representation. *Acta Politica 41,* 197-213.

Norris, P., & Lovenduski, J. (1995). *Political Recruitment: Gender, Race and Class in the British Parliament.* Cambridge: Cambridge University Press.

Nwankwor, C. (2022). *Priorities for advancing women's equal political leadership in the coming year.* The Brookings Institution.

O'Leary, V. E., & Flanagan, E. H. (2001). *Leadership. In J. Worell (Ed.), Encyclopedia of women and gender: Sex similarities and differences and the impact of society on gender* . Oxford: Elsevier Science & Technology.

O'Neil, Tam, Plank, G., & Domingo, P. (2015). Literature review: Support to women and girls' leadership: A rapid review of the evidence. *Overseas Development Institute (ODI).*

Oakley, J. G. (2000). Gender-based Barriers to Senior Management Positions: Understanding the Scarcity of Female CEOs. . *Journal of Business Ethics, 27(4),* 321–334.

OECD. (2015). *Why quotas work for gender equality.* oecd.org.

OECD. (2016). *Background Report: Conference on improving women's access to leadership.* Paris: OECD Publishing.

O'Keefe, D. (1990). *Persuasion: Theory and Research.* Newbury Park, CA, USA: Sage Publications.

Onong Uchjiyana Efendy. (2006). *Pengantar Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Paburapapap, W. (2022). *Law, Values and Gender Discrimination. Exploring the obstacles of Thai women in the political arena*. Retrieved February 17, 2024, from https://workpointtoday.com/anfrel-genderequity2022/

Parwati, T., & Istiningdiah, K. (2020). Partisipasi Dan Komunikasi Politik Perempuan Di Legislatif Menurut Kacamata Politisi Perempuan Di Indonesia. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 9, No. 2, ISSN 2548-4907* , 119 -129.

PCW, (. C. (2021). *Philippines Still Best Performing Country in Asia Despite Slip by One Notch in Global Gender Gap Ranking.* Manila: PCW.gov.

Petty, R. E. (1986). *The elaboration likelihood model of persuasion.* . Advances in Experimental Social Psychology, 19, .

Pitts, M. J., & Socha., T. J. (2013). *Positive Communication in Health and Wellness. 1st ed.* New York: Lang Publishing.

Pressbooks. (2018). *Unit Of Analysis And Unit Of Observation*. Retrieved November 05, 2023, from SCIENTIFIC INQUIRY IN SOCIAL WORK: https://pressbooks.pub/scientificinquiryinsocialwork/chapter/7-3-unit-of-analysis-and-unit-of-observation/

Prihatini, E. (2019). Islam, parties, and women's political nomination in Indonesia. *Politics & Gender 16(3),* 637–659.

Prihatini, E. (2019). Women's views and experiences of accessing national parliament: evidence from Indonesia. *Women's Studies International Forum 74*, 84-90.

Reuters. (2013, December 14). *High Society Hits the Streets as Prominent Thais Join Protests*. Retrieved January 26, 2024, from https://www.reuters.com/article/amp/idUKBRE9BC0ZI20131213/?irpc=932&__twitter_impression=true

Rey, C. d. (2005). Gender, women and leadership. *Agenda: Empowering women for gender equity, 19:65,* 4-11.

Rhoads, E. (2012). Women's Political Participation in Indonesia: Decentralisation, Money Politics and Collective Memory in Bali. *Journal of Current Southeast Asian Affairs, 31(2).,* 35-56.

Rosaldo, M. Z., Lamphere, L., & Bamberger, J. (1974). *Woman, Culture, and Society.* California: Stanford University Press.

Rosenberg, M. B. (2015). *Nonviolent Communication 3rd Edition.* USA: Puddle Dancer Press.

Rosenberg, M. B. (2015). *Nonviolent Communication: A Language of Life 3rd Edition.* United States: PuddleDancer Press.

Sahyana, et al. (2022). Marginalization of Women's Leadership in Politics and Government. *Progress in Social Development, Volume 3 No 2 Juli 2022*, 63-74.

Saidon, N. R. (2017). Faktor kepimpinan dan gender dalam penglibatan politik wanita di Malaysia (1980–2013). *Akademika 87(3)*, 63–75.

Satriyo, H. (2010). Pushing the boundaries: women in direct local elections and local government. In: Aspinall E and Mietzner M (eds) Problems of Democratisation in Indonesia: Elections,Institutions and Society. *Institute of Southeast Asian Studies*, 243–263.

Schein, V. E. (1996). Think manager—think male: A global phenomenon? . *Journal of Organizational Behavior, 17(1)*, 33-41.

Schramm, W. (1954). *How communication works. In The process and effects of communication* . University of Illinois Press.

SDG Move. (2023). *The role of 'women' in the political space What challenges have you faced along this journey?* Bangkok: Centre for SDG Research and Support: SDG Move.

Setnas ASEAN. (2017). *Sekretariat Nasional ASEAN Indonesia*. Retrieved October 29, 2023, from Tentang ASEAN: https://setnasasean.id/tentang-asean

Shair, -R. (2012). The alternative incumbency effect: electing women legislators in Indonesia. *Electoral Studies 31(3)*, 576–587.

Shair-Rosenfield, S. (2012). The alternative incumbency effect: Electing women legislators in Indonesia. *Electoral Studies, 31(3)*, 576-587.

Shoelhi, M. (2014). *Komunikasi Internasional Perspektif Jurnalistik.* Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Siahaan, A. Y. (2002). "The Politics of Gender and Decentralization in Indonesia.". *Center for Policy Studies, Central European University, International Policy*, 1-38.

Simon, H. (1976). *Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organization.* New York: Free Press.

Sinpeng, A. (2022). *"Women's Political Leadership in the ASEAN region: Research Report."* . University of Sydney and Universitas Gadjah Mada .

Siregar, W. (2005). Parliamentary representation of women in Indonesia: the struggle for a quota. *Asian Journal of Women's Studies 11(3)*, 36-72.

Subramanian, M. (2000). Penyertaan wanita dalam Malayan Indian Congress (MIC). *Satu kajian kes Batang Berjuntai. Universiti Malaya Malaysia.*

Subramanian, R. B. (2016). Women leadership in organization. . *Indore Management Journal, 8(2),* 15-26.

Tadros, M. (. (2014). *Women in Politics: Gender, Power and Development.* Bloomsbury Publishing.

Tashakkori, A., Johnson, R. B., & Teddlie, C. (2021). *Foundations of mixed methods research. Integrating quantitative and qualitative approaches in the social and behavioral sciences (2nd ed.).* Sage.

The ASEAN Secretariat. (2023). *ASEAN Statistical Yearbook 2023.* Jakarta: The ASEAN Secretariat.

The Economist. (2011). *Women in Politics: Wives and daughters*. Retrieved February 16, 2024, from The Economist online: http://www.economist.com/blogs/dailychart/2011/07/women-politics

Tremblay, M. (2007). Electoral systems and substantive Representation of women: A comparison of Australia, Canada and New Zealand. *Commonwealth & Comparative Politics, 45(3),* 278-302.

Trenggono, N. (2021). *Antagonisme Komunikasi Politik; Konsekuensinya Terhadap Integritas Politik.* Yogyakarta: Suluh Media.

True, J. S. (2012). *Women's Political Participation in Asia and the Pacific.* SSRC Conflict Prevention and Peace Forum.

Uhlaner, C. J. (2015). Politics and Participation. In J. D. Wright, *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition)* (pp. 502-508). Elsevier.

UN Women & UNDP. (2023). *THE PATHS TO EQUAL: Twin indices on women's empowerment.* UN Women & UNDP.

UN Women. (2021). *ASEAN gender outlook.* unwomen.org.

UN Women. (2021). *Facts and Figures: Ending Violence against Women and Girls.* Asia Pacific UN Women.org.

UN Women. (2022). *Women's Leadership in the ASEAN Region: Data Snapshot.* asiapacific.unwomen.org.

UNDP. (2006). *Women's Right to a Political Voice in Thailand. Millennium Development Goal 3: Promote gender equality and empower women.* Bangkok: United Nations Development Programme.

UNDP Indonesia. (2019). *Women's Participation in Politics and Government in Indonesia.* Jakarta: UNDP Indonesia.

UNDP, A. P. (2010). *Power, Voice and Rights: A Turning Point for Gender Equality in Asia and the Pacific.* Sri Lanka: Macmillan.

United Nations. (2014). *The Government of Thailand's National Review.* Sustainabale Development Goals.un.org.

United Nations Human Rights. (2023). *Parliaments play a crucial role in women's equal right to participate.* United Nations.

USAID. (2014). *Patriarchal Barriers to Women's Political Participation in South-East Asia: Lessons from the Philippines, Cambodia, Malaysia, Indonesia, and Timor-Leste on Patriarchy and the Rise of Women's Participation in State Politics.* Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan ISBN: 978-602-1616-19-2.

Valero, D. (2021). *ASEAN Gender Outlook.* UN Women.org.

Veneracion-Rallonza, L. (2008). *Women and the Democracy Project: A Feminist Take on Women's Political Participation in the Philippines.* Copenhagen: NIAS Press.

Verba, S. &. (1972). *Participation in America: Political democracy and social equality.* Harper & Row.

Volden, C. A., & Wittmer, a. D. (2013). When are Women More Effective Lawmakers than Men? *American Journal of Political Science 57(2)*, 326-341.

Voydanoff, P. (2005). Toward a conceptualization of perceived work-family fit and balance: A demands and resources approach. . *Journal of Marriage and Family, 67(4)*, 822–836.

Wardhani, A. C. (2009). Etika Berkomunikasi dalam Penyampaian Aspirasi. *Jurnal Komunikasi Universitas Tarumanegara*, 14-18.

Wardoyo, H., Trenggono, N., & et al, e. (2003). *Meniti Partisipasi Publik.* Bandar Lampung: Kantor Bantuan Hukum (KBH) Lampung.

Welsh, B. (2019). *Malaysia: Middle-equality trap.* New York: Palgrave Macmillan.

Westminster Foundation for Democracy. (2022). *Women's Political Leadership in the ASEAN Region: Research report.* UK: WFD & Government of Canada.

Wibowo, E. A. (2018). Penerapan strategi politik dalam peningkatan partisipasi pemilih perempuan pada pilkada serentak di kota Magelang. *International Journal of Government and Social Science, 4(1).*, 29-48.

Winkler, J. R. (2023, June 19). Political Culture. *Encyclopedia Britannica*, pp. https://www.britannica.com/topic/political-culture.

World Economic Forum. (2019). *Global gender gap report 2020.* weforum.org.

World Values Survey. (2018). *World Values Survey (2005-2022).* Austria: World Values Survey Association.

World Values Survey. (2022). *World Values Survey: Round Seven - Country-Pooled Datafile Version 4.0.* Madrid, Spain & Vienna, Austria: JD Systems Institute & WVSA Secretariat.

Zaimah, R. S. (2013). The history and current status of dual-career families in Malaysia. . *Asian Social Science, 9(6),* 16-21.

Daftar Indeks

A

APBN, vii, 163, 170, 180, 181, 209
APSA, vii
APSC, vii, 49
ASEAN, 1, 2, 3, 4, vii, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 26, 27, 34, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 63, 64, 65, 76, 77, 103, 104, 141, 142, 175, 192, 194, 221, 231, 235, 236, 237, 238, 239, 260, 267, 275, 281, 288
Authenticity, 12, 15, 198, 202, 203, 206, 209, 237

B

BBC, vii

BKKBN, vii, 153, 271
BPJS, vii, 92, 111, 112, 129, 153, 154, 155, 156, 168, 200, 201, 271, 272
BPOM, vii, 153, 271

C

CEDAW, vii
CGEO, vii
Chitpas Kridakorn, 44, 67, 68, 71, 72, 88, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 123, 142, 144, 145, 167, 192, 203, 210, 211, 216
Collaboration, 12, 15, 196, 197, 198, 202, 203, 206, 209, 237
Consensus, 237
CPWSD, vii

D

DAU, vii, 76, 126
Disabilitas, 90, 91, 95, 103, 104, 126, 163, 165, 170, 199, 200, 208, 209, 210, 211, 216, 263

E

EIU, vii
Empathy, 12, 15, 53, 195, 197, 198, 202, 203, 206, 209, 237
Ethos, 11, 15, 27, 28, 139, 140, 167

F

Feelings, 14, 30, 31, 66, 123
Filiphina, 1, 2, 3, 2, 5, 9, 25, 26, 27, 44, 52, 54, 55, 80, 83, 88, 94, 98, 116, 117, 118, 132, 158, 161, 169, 175, 176, 187, 188, 190, 195, 197, 198, 203, 206, 212, 213, 216, 230, 231, 233, 236, 237, 277, 278, 281
Freedom, 12, 15, 197, 198, 201, 202, 203, 206, 209, 237

G

GAD, vii, 176, 188, 282
Gaya, 142, 143, 144, 147, 149, 150, 157, 158, 161, 167, 169
Gender, vii, 23, 24, 40, 41, 60, 65, 192, 233, 282
GFP, vii

H

Hambatan, 8, 174, 185, 186, 191, 234, 235, 238, 260, 267, 275, 281, 288
HOR, vii, 282

I

ICA, vii
IDEA, vii
Indonesia, 1, 2, 3, 4, 2, 4, 5, 9, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 44, 48, 52, 53, 54, 55, 57, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 98, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 126, 129, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155,156, 167, 168, 175, 177, 179, 180, 181, 182, 190, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 206, 209, 211, 212, 216, 230, 231, 233, 235, 236, 237, 264, 268, 269, 272
IPU, vii, 52, 53, 54

J

JKM, vii, 215

K

Kebijakan, 9, 93, 123, 126, 129, 211, 213, 216, 259, 263, 271, 274, 278, 279, 281, 284
Kemiskinan, 210, 271, 278, 284
Kepemimpinan, 19, 24, 34, 65
Kesetaraan, 192, 282
Komunikasi, 2, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 48, 65, 76, 77, 195, 198, 203, 206, 231, 236
Konsep, 23, 40

L

Ledia Hanifa Amaliah, 44, 54, 56, 73, 74, 75, 90, 104, 106, 107, 109, 126, 147, 149, 150, 151, 167, 198, 202, 211, 212, 216, 263
Logos, 11, 15, 27, 139, 167
LZS, vii, 215

M

Malaysia, 1, 2, 3, 4, vii, viii, 2, 5, 9, 10, 26, 27, 44, 48, 52, 54, 55, 83, 84, 85, 86, 87, 96, 97, 119, 120, 134, 161, 163, 164, 165, 170, 175, 182, 184, 185, 190, 206, 208, 209, 214, 215, 216, 230, 231, 233, 236, 237, 283, 284, 285
Masyarakat, vii, 20, 77, 85, 109, 112, 113, 126, 134, 199, 201, 210, 215, 259, 262, 270, 273

Media, 69, 70, 72, 73, 75, 85, 89, 91, 96, 99, 101, 103, 109, 111, 112, 117, 121, 145, 146, 151, 154, 155, 162, 165
MP, viii, 72

N

NCA, viii
Needs, 14, 30, 32, 66, 98, 123
Nihayatul Wafiroh, 44, 54, 57, 76, 77, 78, 80, 92, 93, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 129, 147, 153, 154, 155, 156, 157, 168, 179, 180, 181, 182, 198, 201, 202, 203, 211, 216, 270
Nonviolence, 29, 193, 195
Nonviolent, viii, 12, 26, 29, 44, 66, 67, 84, 87, 90, 98, 115, 116, 123, 134, 194, 197, 200, 203, 204, 208
NVC, viii, 12, 14, 23, 29, 30, 31, 32, 66, 67, 69, 70, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 110, 123, 126, 129, 132, 134, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 209

O

Observations, 14, 30, 66, 123
OECD, viii
OSCC, viii, 96, 97, 134, 206

P

Parlemen, 5, 15, 25, 44, 51, 62, 68, 71, 72, 80, 83, 84, 85, 88, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 114, 115, 117, 118, 120, 123, 134, 142, 144, 158, 161, 163, 164, 165, 170, 176, 187, 191, 192, 195, 197, 198, 202, 203, 206, 209, 210, 211, 214, 215, 221, 230,258, 259, 260, 263, 267, 271, 275, 281, 283, 284, 288
Pathos, 11, 15, 27, 139, 167
PDRC, viii, 58, 143
Perempuan, viii, 1, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 49, 50, 51, 52, 57, 65, 66, 76, 77, 97, 134, 190, 191, 192, 193, 210, 212, 213, 214, 215, 231, 234, 236, 238, 260, 267, 268, 275, 281, 282, 284, 285, 288
Persuasi, 26, 27
Pesan, 36, 38, 39
Pia S. Cayetano, 54, 60, 80, 81, 83, 94, 116, 117, 118, 119, 132, 158, 160, 169, 176, 187, 195, 197, 213, 214, 216, 277
Politik, 2, 10, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 40, 49, 186, 234, 238, 258
PPPK, viii, 75, 76, 126, 151
Publik, 26, 27, 39, 48, 66, 216, 231, 236
PWB, viii, 215, 284, 285

R

RA, viii, 118, 214
Requests, 14, 30, 32, 98, 123
RM, viii, 207, 215, 284
Rodziah Ismail, 44, 62, 83, 84, 85, 96, 97, 119, 120, 134, 161, 162, 163, 164, 165, 170, 206, 207, 214, 215, 216
RUU, viii, 15, 90, 145, 159, 160, 169, 180, 181, 212, 264, 271

S

SDGs, viii, 11, 278
SRD, viii
Stereotipe, 182

T

Thailand, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 26, 27, 44, 48, 52, 54, 55, 58, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 80, 86, 87, 88, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 123, 142, 143, 144, 145, 146, 167, 175, 190, 191, 192, 203, 204, 205, 206, 209, 210, 211, 216, 230, 231, 233, 236, 237, 258, 259, 261

U

UDHR, viii
UN, viii
UNDP, viii, 1, 2

V

VAWP, viii

W

Wanita, 34, 56, 62, 121, 134, 216, 278, 284
WEF, viii
WEI, viii, 285
WFD, viii
WHO, viii
WPS, viii, 49, 50